



MEDIA KEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL



IMPOR BARANG BAWAAN LUAR NEGERI

Setiap kegiatan memasukkan barang dari luar ke dalam negeri merupakan proses impor barang. Lalu lintas barang yang beredar di wilayah NKRI perlu diawasi, guna melindungi masyarakat dan industri dalam negeri.

Daftar Isi



Foto Cover
Anas Nur Huda

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

LAPORAN UTAMA

- 15 Perbaiki Anggaran, Perbaiki Infrastruktur
- 18 Infografis
- 20 Infrastruktur Penggerak Ekonomi
- 23 Manfaat Jangka Panjang Infrastruktur Asian Games
- 25 Perubahan untuk APBN Lebih Kredibel

WAWANCARA

- 27 Paradigma Baru Pengelolaan Lelang

POTRET KANTOR

- 30 KPKNL Bukittinggi Mendayung Sukses Bersama GADANG

FIGUR

- 32 Dari Nyawa Terancam Hingga Miliaran Tawaran

EKONOMI TERKINI

- 36 Potensi Akselerasi Investasi atas Penurunan Suku Bunga

KOLOM EKONOM

- 40 Merebut Momentum Pemulihan Ekonomi Global

GENERASI EMAS

- 44 Kiat Agus Raih Gelar Doktor Singkat

OPINI

- 46 Pajak dan Dukungan Publik

REGULASI

- 48 Dana Jaminan untuk Percepatan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

INSPIRASI

- 50 Menebarkan Cahaya Quran di Kampus STAN

RENUNGAN

- 52 Tentang Roti Gosong Sebelah

FILM

- 53 Keluarga Kita: Mencintai Dengan Lebih Baik

JALAN-JALAN

- 54 Pacu Jalur Tak LelangDimakan Zaman

SELEBRITI

- 56 Puisi Untuk Sri Mulyani



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.



5 Alasan untuk tetap tenang

Menyikapi PP 36 Tahun 2017 Tentang
Penaan PPh Atas Penghasilan Tertentu
Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan
Atau Dianggap Sebagai Penghasilan



Peraturan Pemerintah ini adalah kelanjutan program Amnesti Pajak sekaligus memberikan **rasa keadilan** bagi mereka yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar termasuk mereka yang sudah ikut Amnesti Pajak



Memberikan **kepastian hukum** bagi wajib pajak dan petugas pajak dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sesuai **Pasal 18 UU Pengampunan Pajak**



Pelaksanaan pemeriksaan **tidak ditujukan** bagi masyarakat yang berpenghasilan **dibawah PTKP** (54.000.000/tahun)



Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan **faktor risiko** bagi penerimaan dengan tetap menjaga **confidence masyarakat** dan **pelaku usaha**.



Bagi wajib pajak yang merasa **belum menjalankan kewajiban pajak secara benar**, masih dapat melakukan **pembetulan SPT** sesuai ketentuan yang berlaku (dengan memasukkan **harta** dan **penghasilan** yang belum dilaporkan)

Memperketat Aturan Barang Bawaan Penumpang

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali menegakkan peraturan yang sudah berlaku sejak tahun 2010. Selama ini, masyarakat tidak teredukasi dengan baik mengenai aturan barang bawaan yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri. Pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.04/2010 disebutkan bahwa barang bawaan penumpang dibatasi senilai USD250 per orang atau USD1000 per keluarga.

Pembatasan juga termasuk untuk 200 batang sigaret atau 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris, dan 1 liter minuman yang mengandung alkohol. Jika penumpang membawa barang melebihi batas nilai tersebut, maka atas kelebihannya akan dikenakan bea masuk atau pajak impor.

Walaupun sudah lama berlaku, banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Tentu saja kehebohan segera terjadi ketika peraturan ini mulai ditegakkan. Apalagi, contoh penegakkan peraturan tersebut tersebar melalui video yang memperlihatkan penenaan bea masuk dan pajak impor yang kemudian menjadi viral. Banyak protes dan gejolak yang terjadi. Utamanya adalah karena tidak adanya sosialisasi sebelumnya dan nilai pembatasannya yang dianggap terlalu kecil.

Kebijakan pembatasan ini tentu saja bertujuan baik untuk meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia. Namun demikian, sebaik apapun sebuah kebijakan, apabila tidak dapat dikomunikasikan dengan baik, maka akan mendapatkan banyak tantangan. Terlebih lagi kebijakan tersebut sangat

berdampak secara langsung pada kehidupan masyarakat dan sudah lama tidak diberlakukan secara ketat.

Sebuah pelajaran yang baik bagi Kementerian Keuangan dalam membuat suatu kebijakan dan juga penerapannya. Banyak juga masukan yang diberikan oleh masyarakat terkait hal ini yang perlu mendapat perhatian. Masukan tersebut antara lain perlunya sosialisasi, penaikan nilai minimal pembatasan, dan konsistensi penegakan hukumnya.

Terlepas dari itu semua, penegakkan peraturan ini hendak membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Suatu awal yang baik bagi terciptanya kepastian hukum dan keteraturan dalam bermasyarakat.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
@kemenkeuRI

Sampaikan masukan & dukunganmu pd ketentuan barang bawaan penumpang agar berjalan efektif & tepat sasaran.

Angga
@AN99A_K

Saya sangat setuju dgn kebijakan pembatasan bea masuk ini, krn selain mjadi pendapatan negara melalui bea masuk, kebijakan ini scr tdk lngsung jg membuat WNI yg berlibur di luar negeri utk tdk trlalu banyak membelanjakan

dananya di negara lain, yg mana hal ini diharapkan akan membuat mereka lebih memilih belanja produk buatan dalam negeri di negara sendiri.

Ruslan Zainuddin
@ar_quarantine

Saya sangat setuju dengan kebijakan pembatasan barang

bawaan penumpang dari luar negeri. Agar kebijakan barang bawaan penumpang ini berjalan efektif & tepat sasaran, maka pemerintah harus melihat referensi dari negara lain, tentunya bisa dengan cepat negara lain seperti apa. Memang ada sebagian yang lebih tinggi, dan ada yang lebih rendah,

kita lihat di mana posisi kita.

@Ahlulfikri27

Lembaga terkait harus mensosialisasikan terkait ketentuan brg bawaan penumpang pd media & terminal" keberangkatan



Mengawal Projek MRT Jakarta

Pendanaan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta berasal dari pinjaman pemerintah Jepang melalui JICA (Japan International Cooperating Agency). Pinjaman tersebut diteruskan (on-lending) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 51 persen dan diterushibahkan (on-granting) ke APBN sebesar 49 persen. DJPK memiliki peran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Hibah MRT yang bertugas mengusulkan besaran hibah setiap tahun dalam APBN sesuai usulan dan pembahasan dengan Pemerintah Provinsi DKI dan PT MRT Jakarta, menyusun dokumen penyaluran hibah MRT, serta menyalurkan hibah MRT.

Foto
Adhi Kurniawan

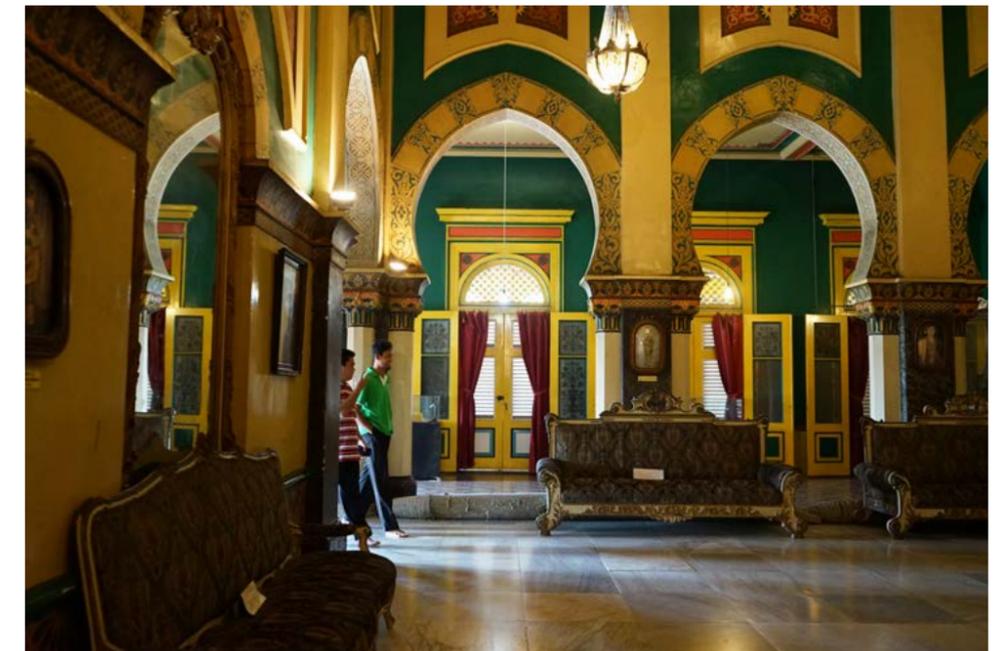


Istana Maimun, Jejak Kejayaan Tembakau Deli



Istana Maimun yang terletak di Medan ini merupakan peninggalan Kerajaan Deli. Sultan Maimun Al Rasyid Perkasa Alamsyah membangun istana ini pada tahun 1888 dan selesai tiga tahun kemudian. Saat itu Kerajaan Deli dikenal sebagai penghasil tembakau kualitas wahid. Tembakau Deli diekspor hingga Eropa.

Foto
Adhi Kurniawan





14/10

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Press Briefing Menteri Keuangan atas Kegiatan IMF-WB

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menggelar *press briefing* pada penutupan International Monetary Fund – World Bank Annual Meetings 2017 (IMF-WB AM 2017) di Washington DC pada Sabtu, (14/10) yang merangkum beberapa hasil pertemuan yang membahas minat membangun infrastruktur Indonesia. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh Gubernur Bank Sentral, Menteri Keuangan, organisasi non pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.

Untuk sektor kelistrikan, ASEAN Finance Corporation (AFC), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), dan Jerman menyatakan minatnya untuk membantu Indonesia membangun energi listriknya. “Pertemuan bilateral dengan presiden AFC mengenai meningkatkan minat investasi dan peranan swasta terutama infrastruktur di Indonesia mulai dari kelistrikan dan infrastruktur yang lain. Saya juga bertemu presiden JBIC membahas terutama investasi mereka di sektor kelistrikan. Selain itu, Jerman juga menyatakan minatnya pada infrastruktur sektor kelistrikan yang bisa diperbarui seperti proyek geothermal,” jelasnya.

Menkeu menambahkan, di sektor pertanian dan pembangunan desa, IFAD dapat membantu Indonesia. “Presiden IFAD memiliki kepentingan untuk kebutuhan replenishment ke-18 untuk membantu negara-negara anggotanya dalam sektor pertanian dan sektor pedesaan. Saya meminta IFAD

supaya bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti Bank Dunia,” terangnya. Pada beberapa sektor transportasi massal dan urbanisasi, AFC menyatakan minatnya untuk meningkatkan partisipasi swasta. Selain itu, Indonesia juga akan mendapatkan investasi untuk masalah air dan sanitasi serta akan dibantu dalam memitigasi kebakaran hutan atau *forest management*.

Menkeu juga menjadi pembicara utama dalam pembahasan pajak dengan menyampaikan kebijakan reformasi pajak, program pengampunan pajak hingga persiapan AEOI dan fenomena *e-commerce*. “Paling menonjol adalah munculnya fenomena *e-commerce*, dimana semua Menkeu akan melakukan kajian lebih mendalam mengenai respons para menkeu terhadap tren yang berbasis digital. Bagaimana dari sisi *policy* dan perpajakan. Salah satu yang paling penting adalah memperluas konsep perusahaan sebagai (bentuk) fisik namun juga kegiatan ekonomi,” ujarnya. Dalam pembahasan *cyber security*, banyak negara yang merasa ini sebagai ancaman serius karena menyerang keamanan sektor keuangan. “Perlu langkah bersama agar G20 terus mewaspadai dan melihat ancaman dari sistem keuangan melalui serangan *cyber security*. Ini akan diusulkan jadi salah satu topik di bahas G20 ke depan,” imbuhnya.



23/09

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Kuliah Umum Wakil Menteri Keuangan di Universitas Gajah Mada

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa Kelas Kerjasama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Universitas Gajah Mada (UGM) di Auditorium Djarum Lt.6 Pertamina Tower UGM Yogyakarta, pada Jum’at (23/09). Wamenkeu menekankan pentingnya peranan generasi muda dalam pembangunan bangsa. “Jadi, kalau adik-adik mahasiswa, yang muda, penerus estafet bangsa, gunakanlah kecerdasan demi kemajuan negara kita,” ujarnya. Menurut Wamenkeu, Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berperan penting meningkatkan kapasitas fiskal negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.



29/09

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Kemenkeu Raih Penghargaan Sebagai Kementerian Terpopuler

Sekretaris Jenderal (Sesjen) mewakili Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menerima penghargaan untuk kategori Menteri Terpopuler, serta mewakili Kementerian Keuangan sebagai penerima penghargaan untuk kategori Kementerian Terpopuler. Penghargaan tersebut diserahkan pada acara Awarding Night Indonesia Corporate Public Relations Award (IPRA) 2017 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi dengan tema “Beyond PR Excellence” di Rafflesia Ballroom Balai Kartini, Jakarta pada Jum’at (29/09). Warta Ekonomi memberikan apresiasi kepada perusahaan dan mitra strategis seperti kementerian yang berhasil menciptakan pemberitaan positif dan citra baik oleh kinerja Public Relations (PR) perusahaan dan kementerian tersebut. Penerima penghargaan tersebut ditetapkan oleh Unit Riset Independen Warta Ekonomi.

03/10

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Lantik 170 Pejabat Eselon III

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 170 orang pejabat eselon III Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Aula Mezzanine Kemenkeu pada (03/10). Menkeu memberikan ucapan selamat kepada para pejabat telah dipercaya dan ditunjuk untuk mengemban tugas baru di posisi masing-masing. Menkeu mengungkapkan kegembiraannya atas adanya pejabat wanita terlantik sejumlah 16,9%. “Dengan niat yang tulus, komitmen yang tinggi, dedikasi yang penuh, dan kecintaan yang tidak ada duanya kepada republik, Insya Allah anda bisa menjalankan secara baik. Selamat sekali lagi dan semoga apa yang Anda jalankan benar-benar bisa menciptakan Indonesia menjadi negara yang lebih baik,” tutup Menkeu.



Menkeu Mewisuda Mahasiswa PKN STAN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan beberapa pesan kepada wisudawan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN pada Selasa (03/10) di gedung Student Center (SC) PKN Bintaro, Tangerang Selatan. Pesan pertama yang disampaikan adalah agar menjadikan ilmu yang didapat selama belajar di PKN STAN sebagai ladang amal untuk Indonesia. Kedua, Menkeu berpesan agar membuka diri terhadap perbedaan. "Saya ingin lulusan PKN STAN merupakan manusia-manusia yang mampu menghargai dan memahami perbedaan," ungkapnya. Pada kegiatan wisuda ini PKN STAN mengukuhkan 2.318 mahasiswa, sedangkan di hari kedua, Rabu (04/09) sebanyak 2.184 mahasiswa akan diwisuda, sehingga total wisudawan berjumlah 4.502 mahasiswa yang lulus tahun 2017.



03/10

Teks
Biro KLI
Foto
Biro KLI



04/10

Teks
Biro KLI
Foto
Biro KLI

DPR Setujui Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018

DPR menyetujui pagu anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari tiga agenda rapat kerja (raker) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dengan Komisi XI DPR RI. Agenda tersebut yaitu rencana kerja anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2018, anggaran pembiayaan tahun 2018, serta pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) APBN Perubahan (APBN-P) 2017. "Kami telah menyampaikan semua rencana kerja kami bersama anggaran yang akan direncanakan tahun 2018. Berbagai masukan yang disampaikan oleh pimpinan dan para anggota merupakan catatan yang penting untuk kami menjalankan rencana kerja dan anggaran kami seefisien mungkin," ungkapnya di Ruang Rapat Kerja Komisi XI DPR, Rabu (04/10). Dari hasil raker tersebut, Komisi XI menyetujui pagu anggaran Kemenkeu untuk RAPBN 2018 sebesar Rp45,6 triliun.

Agenda

- 01/11 Rakernas Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta
- 01/11 DJPPR Goes to Campus "Sosialisasi Pengelolaan Utang di Universitas Atmajaya"
- 02-04/11 Rakernas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta
- 08/11 Public Private Partnership (PPP Day 2017) di Jakarta
- 14/11 DJPPR Goes to Campus "Sosialisasi Pengelolaan Utang di Universitas Trisakti"
- 30/11 Investor Gathering di Jakarta



05/10

Teks
Biro KLI
Foto
Biro KLI

Menkeu Memberikan Penghargaan Kepada Pegawai DJP Berprestasi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi 66 pegawai Pajak berprestasi tingkat nasional dengan potensi dan capaian yang dimilikinya. Hal ini disampaikan dalam acara Penganugerahan Penghargaan Kinerja DJP tahun 2017 pada Kamis (05/10) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta. Ia berpesan kepada organisasi agar memberikan apresiasi dan kesempatan karir yang baik kepada pegawai yang berprestasi. "Orang-orang yang mendapatkan penghargaan ini, menurut saya tidak hanya sekedar mendapatkan tadi sertifikat, namun saya ingin mereka harus mendapatkan recognition di dalam kenaikan pangkat pertama atau promosi, mereka harus menjadi salah satunya," pesannya. Menkeu meminta organisasi untuk jeli memetakan fungsi pemberdayaan pencapaian dan pengembangan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Keuangan.



PKN STAN Raih Penghargaan IAEP

10/10

Teks
Biro KLI
Foto
Biro KLI

Politeknik Keuangan Negara STAN menerima penghargaan Internal Auditing Education Partnerships (IAEP) tingkat Internal Auditing Foundation Programs dari The Institute of Internal Auditors Global (The IIA). Penghargaan tersebut diberikan oleh Sekretariat Jenderal IIA Global kepada Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo yang didampingi perwakilan dari PKN STAN pada acara The Institute of Internal Audit Indonesia (IIA) 2017 National Conference di Intercontinental Hotel Bandung pada Selasa (10/10). Dalam sambutannya, Wamenkeu menyampaikan bahwa PKN STAN bangga menjadi salah satu yang diakui di tingkat regional Asia Tenggara. Ia berharap di masa depan, tingkat sertifikasi PKN STAN dalam IAEP dapat melebihi dari level foundation saat ini. "Kita bangga betul menjadi salah satu di Asia Tenggara. Harapannya dengan continues learning, kita akan naik level komprehensif tidak hanya foundation," tutupnya.

17/10

Teks
Biro KLI
Foto
Biro KLI

Wamenkeu Paparkan Capaian 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Sejumlah menteri dan wakil menteri memaparkan capaian 3 tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/10). Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo memaparkan hal-hal yang dilakukan pemerintah. Dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga ke pelosok Indonesia, pemerintah memberikan beasiswa Lembaga Pengelola Pendidikan (LPDP) yang mengutamakan pelamar dari daerah terluar, terdepan, dan terpencil di Indonesia. "Ini banyak yang coba kita berikan termasuk kemarin peningkatan PTKP dan juga kita evaluasi besaran PTKP dan juga penurunan tarif Pajak Penghasilan (Pph) terutama pengalihan tanah dan bangunan. Dan juga sekarang ada reformasi perpajakan terutama untuk pemenuhan kewajiban perpajakan atau yang tax payer friendly masuk e-filing, e-faktur, e-SPT dan e-billing dan seterusnya," tutup Wamenkeu.



Bea dan Cukai Customs



Suasana Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Foto Resha Aditya Pratama

SEMANGAT MELINDUNGI DALAM TIAP PUNGUTAN

Lu-lalang para pelangcong dari dalam dan luar negeri memenuhi Bandara Internasional Soekarno Hatta. Pada sudut-sudut bandara, tampak petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sibuk menjalankan tugas. Para penumpang yang datang dari luar negeri dan diduga membawa barang bawaan yang tidak sesuai ketentuan akan diperiksa.

Membawa buah tangan setelah berpergian dari luar negeri adalah hal yang lumrah. Namun, tidak banyak yang tahu, bahwa kegiatan tersebut merupakan proses bisnis impor barang. Setiap penumpang yang membawa barang belanjaan dari luar negeri, perlu memastikan bahwa nilainya tidak melebihi batasan (*threshold*) yang telah ditentukan agar bisa terbebas dari bea masuk. Untuk itu, penumpang yang membawa barang impor melebihi *threshold*, perlu bersiap membayar kelebihan atas nilai barang bawaan, sebelum diizinkan membawa pulang barang bawaannya.

Bersama-sama dengan pemilik barang, petugas DJBC melakukan pengecekan terhadap barang bawaan penumpang. Pemeriksaan ini penting dilakukan, guna mencegah masuknya barang impor ilegal, maupun barang yang terkena larangan dan pembatasan (LARTAS). Termasuk, buah tangan dari luar negeri yang jumlahnya melebihi *threshold* yang ditentukan.

Barang Bawaan Penumpang

Baru-baru ini, aturan terkait bea masuk barang bawaan penumpang sempat menjadi sorotan masyarakat di sejumlah lini massa. Terutama, pasca viralnya video petugas bandara yang sedang memeriksa barang bawaan penumpang. Dalam video tersebut, tampak petugas mendapati pasangan suami

istri yang membawa buah tangan dari luar negeri berupa satu buah tas mewah yang nilainya melebihi *threshold* yang dipersyaratkan agar bisa dibebaskan dari pengenaan bea masuk barang impor. Pada akhirnya, meski dipergunakan bagi keperluan pribadi, barang tersebut tetap dikenakan bea masuk dan pajak sesuai ketentuan.

Pemerintah memiliki aturan yang jelas terkait barang bawaan penumpang. Menteri Keuangan (Menkeu) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman. Meski telah diterapkan sejak 1996 dan direvisi dengan peraturan terbaru melalui PMK Nomor 188 Tahun 2010, aturan terkait impor barang bawaan penumpang ini rupanya belum banyak diketahui masyarakat.

Setiap penumpang yang membawa barang belanja dari luar negeri dapat dibebaskan dari bea masuk dan cukai, apabila nilainya tidak melebihi USD250 per orang pribadi, atau USD1000 per keluarga. Apabila diketahui membawa barang dengan melebihi nilai batasan tersebut, penumpang akan dikenai bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI).

Sementara itu, untuk jenis dan jumlah barang belanjaan yang dibebaskan dari bea masuk dan cukai adalah 25 batang cerutu, 200 batang sigaret, 10 gram tembakau iris, dan 1 liter minuman alkohol. Penumpang yang membawa barang melebihi jumlah dimaksud, maka kelebihannya akan langsung dimusnahkan oleh DJBC dengan atau tanpa disaksikan penumpang yang bersangkutan.

Importasi dan Perlindungan

Sudah menjadi ketentuan bahwa setiap barang yang masuk ke wilayah NKRI dianggap sebagai barang impor. Oleh karenanya, barang-barang tersebut secara otomatis terutang bea masuk dan PDRI. Begitu juga yang berlaku bagi barang bawaan penumpang. Pemeriksaan barang bawaan penumpang menjadi salah satu tugas rutin yang dilakukan DJBC. Tujuannya jelas, yaitu untuk melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya, seperti narkoba, serta barang-barang LARTAS, seperti rokok dan alkohol. Termasuk juga, melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat.

Untuk itu, perlu diketahui bahwa tidak setiap buah tangan hasil belanja luar negeri dapat dibawa masuk ke dalam negeri. Masyarakat yang datang dari luar negeri diwajibkan mengisi *custom declaration* sebagai dokumen pabean. Fungsinya untuk memberikan informasi pabean atas impor barang yang dibawa penumpang maupun awak sarana pengangkut. Melalui media ini, DJBC dapat mengantisipasi adanya penyelundupan barang LARTAS maupun barang bawaan yang jumlah dan jenisnya tidak sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya, penumpang yang membawa barang bawaan tertentu perlu melapor kepada petugas DJBC untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Barang-barang bawaan yang perlu dilaporkan kepada DJBC untuk dilakukan pemeriksaan antara lain pertama, barang bawaan berupa hewan, seperti ikan

dan tumbuhan. Kedua, barang-barang terlarang seperti narkoba, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, serta benda atau publikasi pornografi. Ketiga, barang berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, video *laser disc* atau piringan hitam. Terakhir, bawaan berupa uang dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing senilai Rp100 juta atau lebih.

Kaji Nilai Batasan

Kepada Media Keuangan, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Badan Kebijakan Fiskal, Nasruddin Djoko menjelaskan *de minimus*, istilah yang biasa dipakai terkait nilai batasan. “De Minimus itu di bawah nilai tertentu dibebaskan bea masuknya. Tidak hanya bea masuk, (tapi juga) PPN dan PPh impor,” jelasnya.

Nilai batasan setiap negara berbeda-beda. Konsep *de minimus* sendiri tidak hanya berlaku untuk barang impor yang dibawa penumpang maupun kiriman, melainkan juga bagi negara perbatasan. “Kan kita punya perbatasan dengan Malaysia, Filipina, Papua Nugini, maupun Timor Leste. Itu De Minimus-nya berbeda,” tambahnya.

Untuk *de minimus* barang kiriman, pemerintah telah menyesuaikan dengan peraturan baru pada 2016 melalui PMK Nomor 182 Tahun 2016 mengenai Ketentuan Impor Barang Kiriman. Sementara, *de minimus* untuk barang bawaan penumpang, kini dalam kajian untuk disesuaikan. Untuk saat ini, batasan USD250 per orang di Indonesia masih dalam batas moderat.

“Kalau rekomendasi ICC, International Chamber of Commerce, *de minimus* untuk *baseline* tidak boleh kurang dari USD200-1200. Kita masih dalam rentang itu,” jelas Nasruddin. Selain itu, aturan di Indonesia berlaku faktor diskon atas tiap kelebihan barang bawaan. “Kalau praktek internasional, itu bukan faktor diskon. Jadi kalau kena USD300,

maka USD300 itu (langsung) dikali tarifnya. Jadi (bea masuk dan PDRI-nya) tinggi,” papar Nasruddin.

Dalam menelurkan kebijakan, pemerintah secara intens melakukan kajian akademis berupa dialog dengan *stakeholders* terkait, termasuk akademisi universitas dan lembaga dari dalam dan luar negeri. Masukan tersebut selanjutnya akan dijadikan pertimbangan untuk direalisasikan. “Kajian dari DJBC sudah ada. Sementara masukan berupa kajian resmi dari CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis) maupun KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) belum kami terima,” jelas Nasruddin.

Menurutnya, beberapa pertimbangan yang dijadikan acuan pemerintah dalam kebijakan antara lain terkait dengan urgensinya, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, dampaknya terhadap inflasi, tenaga kerja, serta bagi penerimaan.

Cegah Ancaman dari Luar

Sudah menjadi tugas DJBC untuk mengawasi dan mencegah segala bentuk ancaman dari luar yang mungkin masuk ke wilayah NKRI. Dalam standar internasional, *customs* (instansi kepabeanan) di belahan dunia manapun, merupakan organisasi yang keberadaannya begitu penting bagi suatu negara. Di Indonesia, peran tersebut dipegang oleh DJBC Kemenkeu.

Terkait hal ini, Nasruddin memaparkan fungsi kepabeanan dan cukai. “Istilah kepabeanan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dua hal, (yaitu) pengawasan dan pungutan,” jelas Nasruddin. Lebih lanjut, dia menjelaskan kewenangan bea cukai dalam hal pengawasan barang. “Jadi kalau (terdapat) barang yang keluar masuk dari suatu negara atau daerah, wajib diperiksa. Yang berhak memeriksa itu CIQ (Customs, Immigration, and Quarantine). Jadi bukan tentara, bukan polisi, tetapi CIQ,” ungkapnya.

Sehubungan dengan hal tersebut,

Petugas DJBC melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang.

Foto Resha Aditya Pratama



terdapat tidak kurang dari lima peran yang dimiliki DJBC guna menjalankan tugas dan fungsinya. Peran pertama adalah melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya (*community protector*). Kedua, melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri (*industrial assistance*). Ketiga, memberantas penyelundupan. Keempat, memberi fasilitas perdagangan atau *trade facilitator*, termasuk melaksanakan titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara. Kelima, memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara (*revenue collector*).

Melindungi Masyarakat

Salah satu tanggung jawab utama yang diemban DJBC adalah *community protector* atau perlindungan terhadap masyarakat. Terkait hal ini, DJBC menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran dan konsumsi barang yang memiliki sifat dan karakteristik yang membahayakan, baik dari sisi kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat. “Dia (DJBC) memproteksi untuk masyarakat, (dengan mengawasi lalu lintas) barangnya itu,” papar Nasruddin.

Selanjutnya, barang-barang yang dikenai aturan LARTAS akan dilarang dan dibatasi lalu lintas peredarannya, baik impor maupun ekspor. Aturan mengenai jenis barang yang termasuk LARTAS diterbitkan oleh instansi teknis terkait, yaitu kementerian atau lembaga (K/L) tingkat pusat, kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan. “Instruksinya bukan dari Menteri

Keuangan, tapi dari K/L lain yang meminta Menteri Keuangan. Lalu, Menteri Keuangan yang menugaskan Bea Cukai,” jelas Nasruddin.

Terdapat sebanyak 20 instansi yang menetapkan LARTAS. Instansi tersebut diantaranya Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Bank Indonesia, Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kepolisian RI, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Kesehatan, misalnya, melindungi masyarakat dari ancaman masuknya berbagai jenis obat dan makanan, termasuk segala jenis kosmetik yang tidak sesuai dengan standar dan mutu yang ditetapkan pemerintah yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup melindungi masyarakat dari kemungkinan masuknya barang yang berpotensi membahayakan lingkungan. Terhadap barang-barang yang masuk dalam kategori LARTAS dan belum memperoleh izin dari instansi terkait, maka DJBC berwenang melakukan penegahan atas barang tersebut.

Melindungi Industri

Salah satu fungsi utama DJBC adalah melindungi industri dalam negeri melalui pengawasan dan pencegahan masuknya barang impor melalui pembatasan regulasi yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan. Menurut Nasruddin, bagi negara maju, industri seharusnya memiliki peran besar. “Harusnya (negara) kita maju dan industri kita kuat. Industri (berperan) mengokohkan. Sebab dengan adanya industri, maka ada tenaga kerja yang terserap,” jelas Nasruddin.

Nasruddin melanjutkan, sulitnya membangun industri, perlu diimbangi dengan dukungan dari pemerintah. Pemerintah sendiri menyadari bahwa tidak baik apabila terlalu memproteksi industri dalam negeri. Namun, jika membiarkan industri dalam negeri digempur oleh sebulan barang impor, maka tidak akan ada industri yang bisa bertahan. “Karena (industri) luar negeri itu *unlimited resources*. Harganya murah-murah, sedangkan skala produksinya sangat besar,” paparnya.

Teks Farida Rosadi

Aturan Barang Bawaan Penumpang

Ada beberapa ketentuan yang patut diketahui dan dipahami agar para penumpang dapat membawa barang bawaan dari luar negeri dengan nyaman tanpa kendala. Saat ini, pelayanan atas barang bawaan penumpang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman. Prosedur dan kebijakan barang bawaan yang dibawa oleh penumpang dapat dilihat pada data berikut.

Dasar Hukum



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang Bawaan yang dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

Saat Tiba di Bandara



Isi Formulir Customs Declaration (CD) dan serahkan kepada petugas Bea dan Cukai



Bila membawa uang tunai Rp100 juta atau lebih/uang asing yang setara nilainya, WAJIB lapor kepada petugas Bea dan Cukai

Nilai Pabean Barang Pribadi Penumpang (Kecuali untuk Barang Dagangan)



Maksimal FOB (Free On Board)
USD250
per orang



Maksimal FOB (Free On Board)
USD1000
per keluarga

Kategori Barang Penumpang



Barang Tidak Langsung



Barang Hand Carry

- Maksimal
15 hari
setelah penumpang tiba
- Maksimal
30 hari
sebelum kedatangan penumpang



1 Liter
Minuman Beralkohol



200 batang
Sigaret



25 batang
Cerutu



100 gram
Tembakau



Perhitungan

Terhadap barang impor yang dibawa penumpang, berlaku ketentuan impor dimana atas barang tersebut terhutang Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)

$$PDRI = PPN + PPh + PPnBM$$

Pasal 22 Pajak Penjualan
Barang Mewah

15%
Tarif PPh Pasal 22

7.5%
Tarif PPh Pasal 22
apabila menunjukkan
NPWP

Contoh Perhitungan



Seorang penumpang membawa tas branded dari luar negeri seharga USD5600 untuk dijual/diperdagangkan. Tas branded tergolong barang mewah, sehingga harus membayar Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)



Bea Masuk = Tarif BM x Nilai Pabean
= Tarif BM x (CIF x Kurs)
= 10% x ((USD5600-0) x Rp13000)
= 10% x Rp72.800.000
= Rp7.280.000



PPN = Tarif PPN x Nilai Impor
= Tarif PPN x (Nilai Pabean + BM)
= 10% x (Rp72.800.000 + Rp7.280.000)
= 10% x Rp80.080.000
= Rp8.008.000



PPh Pasal 22 = Tarif PPh x Nilai Impor
= 7.5% x Rp80.080.000
= Rp6.006.000

Total = BM + PPN + PPh Pasal 22
= Rp7.280.000 + Rp8.008.000 + Rp6.006.000
= Rp21.294.000

Lapor ke Petugas Bea dan Cukai

Apabila Membawa



Ikkan



Hewan



Tumbuhan



Barang Dagangan



Obat



Senjata, amunisi, bahan peledak



Benda/publikasi pornografi



Film, pita video rekaman, video laser disc, piringan hitam/vinyl



MELINDUNGI EKONOMI DALAM NEGERI

Seiring dengan meningkatnya perekonomian global dan domestik, peningkatan lalu lintas barang dan orang antarnegara menjadi suatu hal yang lumrah. Hal itu tentu saja berdampak pada banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang berpergian ke luar negeri dan kembali ke tanah air. Terkait hal tersebut, pemerintah memiliki peran dan tugas yang penting. Untuk menjaga keutuhan dan

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah memerlukan perisai untuk menjaga dan melindungi sumber daya dalam negeri, serta manusianya. Tugas dari perisai ini dilakukan melalui badan atau lembaga yang memiliki fungsi untuk mengurus dan bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan lalu lintas barang dan orang yang terjadi secara khusus di pintu-pintu masuk dan/atau keluar dari wilayah Indonesia.

Di Indonesia, setidaknya ada tiga badan pemerintah yang mewakili tiga fungsi utama pengawasan lalu lintas barang dan orang tersebut. Pertama, Direktorat Jenderal Keimigrasian untuk mengurus bidang imigrasi, legalitas dokumen perjalanan, izin tinggal, visa dan fasilitas, dan sebagainya. Kedua adalah Badan Karantina Pertanian serta Karantina Ikan untuk mengurus karantina dan pencegahan masuk dan tersebarnya segala bentuk media pembawa

hama penyakit yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan ikan. Yang terakhir, adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan yang mengurus kepabeanan dan cukai.

Dalam kapasitasnya sebagai pemegang otoritas kepabeanan dan cukai, DJBC memiliki peran dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, serta mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. DJBC sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi proses impor berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang dari luar negeri. Kendati demikian, ada beberapa ketentuan yang patut diketahui dan dipahami agar para penumpang dapat membawa barang bawaan dari luar negeri dengan nyaman tanpa kendala.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan melalui akun media sosialnya bahwa sebenarnya tidak ada hal baru dari ketentuan yang ada selama ini. Hal tersebut sebenarnya merupakan aturan yang sudah ada sejak lama dan sudah berlaku umum di dunia. “Beberapa waktu yang lalu banyak dibicarakan mengenai adanya ketentuan tentang barang bawaan penumpang dari luar negeri yang merupakan otoritas dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Sebenarnya tidak terdapat hal yang baru dari ketentuan ini,

karena peraturannya sudah ada sejak tahun 1996 dan kemudian dilakukan revisi pada tahun 2010 (Peraturan Menkeu Nomor 188/PMK.04/2010)”, jelasnya.

Barang bawaan

Saat ini pelayanan atas barang bawaan penumpang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman. Direktur Teknis Kepabeanan, R. Fadjar Donny Tjahjadi, mengungkapkan bahwa peraturan tersebut sebenarnya merupakan pengganti dari ketentuan impor barang penumpang yang sebelumnya diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 490/KMK.04/1996 dan diubah ke PMK Nomor 89/PMK.04/2007 sebelum akhirnya terakhir diubah pada tahun 2010.

Pada dasarnya, barang bawaan penumpang berdasarkan aturan tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori menurut ruang lingkup pelayanan kepabeanannya. Pertama, barang pribadi penumpang yang merupakan barang yang dibawa penumpang tetapi bukan termasuk barang dagangan, misalnya barang untuk keperluan pribadi selama perjalanan, barang yang dibeli atau diperoleh di luar negeri dan tidak akan dibawa lagi keluar negeri. Kedua adalah barang dagangan, yaitu barang yang menurut jenis, sifat dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi, diimpor

untuk tujuan diperjualbelikan, barang contoh, bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan industri, dan/atau barang yang akan digunakan untuk selain tujuan pribadi. Untuk kedua barang tersebut, penumpang wajib menyampaikan barang impor yang dibawanya kepada petugas bea dan cukai dengan menggunakan pemberitahuan *customs declaration* (CD) untuk barang pribadi penumpang dan pemberitahuan impor barang (PIB) untuk barang dagangan.

Proteksi impor

Lebih lanjut, Fadjar menjelaskan bahwa tujuan besar dari penerapan ketentuan impor barang bawaan penumpang dengan kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang bawaan penumpang adalah untuk memberikan prinsip keadilan atau *fairness* serta perlindungan industri dalam negeri. “Dalam hal barang bawaan penumpang tidak dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, sedangkan barang produksi dalam negeri dikenakan pajak maka industri dalam negeri tidak dapat bersaing dari segi nilai dengan produk-produk luar negeri yang dibawa oleh penumpang. Ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip keadilan atau *fairness* di atas”, jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, Erwin Situmorang, saat diwawancara Media Keuangan memaparkan bahwa ada tiga peran utama yang dipegang dan dijalankan oleh DJBC yang terkait dengan besaran perdagangan, keamanan masyarakat dan pelaku industri dalam negeri, serta penerimaan negara yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Yang pertama adalah terkait dengan *revenue collection*. “Yang dipungut oleh Bea dan Cukai itu dalam barang-barang yang masuk ke importasi itu ada *revenue*, yaitu bea masuk dan ada yang namanya pajak dalam rangka impor. Pajak dalam rangka impor itu bisa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) impor, kemudian ada PPh (Pajak Penghasilan) impor juga. Tapi ada juga yang namanya PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)”, jelasnya.

Yang kedua, lanjut Erwin, adalah *trade facilitator*, yakni melalui percepatan dalam proses pelayanan

Penumpang mengisi formulir custom declaration.

Foto
Anas Nur
Huda

kepabeanaan sehingga tidak terjadi stagnansi di daerah pelabuhan atau bandara. Dengan begitu, biaya logistik pun dapat diminimalisasi sehingga biaya ekonomi atas barang menurun dan inflasi dapat lebih terkendali.

“Yang ketiga itu adalah *community protector*. Itu bagaimana kita bisa menjaga semua barang-barang yang terlarang tidak bisa masuk ke Indonesia. Contohnya narkoba, senjata api, bom. Itu harus bisa kita jaga supaya jangan masuk ke Indonesia. Serta satu lagi yaitu terkait hal-hal yang bisa mengganggu industri dalam negeri”, papar Erwin.

Ambang batas barang bawaan

Erwin juga menjelaskan bahwa ada dampak lain dari adanya peningkatan lalu lintas orang dari dan/atau ke luar negeri. Salah satunya adalah adanya potensi peralihan jasa borongan, yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai barang dagangan, menjadi barang bawaan pribadi penumpang untuk menghindari pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pelaksanaan impor barang penumpang yang diterapkan di Soekarno-Hatta sendiri mengacu pada PMK Nomor 188 tahun 2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman dengan catatan bahwa aturan mengenai Impor Barang Kiriman telah diperbarui dengan PMK 182 tahun 2016.

Yang perlu diingat adalah bahwa barang penumpang itu sendiri dibedakan ke dalam barang pribadi penumpang dan barang dagangan (*commercial goods*). Barang pribadi penumpang dengan nilai pabean paling banyak sebesar *free on board* (FOB) US\$250 per orang atau US\$1000 per keluarga untuk setiap kedatangan, maka diberikan pembebasan bea masuk. Apabila barang pribadi penumpang melebihi batas nilai pabean tersebut, maka kelebihan atau nilainya dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Namun, pembebasan tersebut tidak berlaku untuk jenis barang berupa barang dagangan (*commercial goods*). “Jadi apabila ada penumpang yang membawa serta barang dagangan saat masuk ke kawasan pabean, barang dagangan tersebut tetap dikenakan bea masuk dan PDRI tanpa memperhatikan batasan nilai sebagaimana diterapkan pada barang pribadi penumpang”, jelas Erwin.

Larangan dan pembatasan

Sebagai *industrial assistance* dan *community protector*, barang bawaan penumpang menjadi salah satu obyek pengawasan dari DJBC Kementerian Keuangan. Di samping berfungsi untuk membantu industri dalam negeri, DJBC Kementerian Keuangan juga bertugas untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang yang terkena larangan atau pembatasan.

“Larangan itu yang benar-benar tidak boleh masuk ke Indonesia. Pada umumnya adalah barang-barang yang memang barang-barang tertentu saja yang dilarang seperti narkoba, senjata, bom. Sementara itu, kalau pembatasan itu memang ada persyaratan khusus yang diperlukan untuk bisa memasukkan barang itu ke dalam daerah Indonesia. Tapi kita harus pisahkan, larangan itu sebenarnya yang seharusnya tidak boleh masuk, sementara kalau pembatasan ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk barang itu bisa masuk ke Indonesia”, jelas Erwin.

Selanjutnya, ada batasan tertentu untuk barang yang kena cukai yang harus diperhatikan oleh setiap penumpang. Erwin menjelaskan bahwa menurut Pasal 9 PMK 188 tahun 2010, barang pribadi penumpang yang merupakan barang kena cukai diberikan pembebasan bea masuk dan cukai untuk setiap orang dewasa dengan jumlah paling banyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya. Selain itu, dibebaskan dari cukai maksimal satu liter minuman mengandung etil alkohol. Dalam hal barang kena cukai yang dibawa melebihi jumlah di atas, maka atas kelebihanannya langsung dimusnahkan oleh pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan penumpang yang bersangkutan. Selain itu, uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya (misal cek, travel cek) senilai Rp100 juta atau lebih juga wajib dilaporkan melalui *custom declaration* oleh penumpang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016, atas kelebihan nilai tersebut dikenakan denda 10 persen dengan nilai maksimal Rp300 juta.

Teks Abdul Aziz

BEA MASUK BAGI DUNIA RITEL

Toko Tas ritel.

Foto
Anas Nur Huda



Bagi banyak orang berbelanja merupakan kegiatan yang menyenangkan. Melihat-lihat dan memilih barang, serta melakukan tawar-menawar menjadi keasyikan tersendiri. Bertumbuhnya kelas menengah turut membuat wisata belanja semakin populer. Sudah lumrah kita lihat wisatawan Indonesia berpelesir ke luar negeri sambil berbelanja, setidaknya untuk membeli oleh-oleh.

“Kalau industri dalam negeri dari hulu ke hilir sudah punya segalanya, siapa yang mau belanja di luar negeri? Apalagi jika harganya kompetitif dan produknya sudah yang terbaru,”

Tutum Rahanta
Wakil Ketua
Asosiasi
Pengusaha Ritel
Indonesia

Kegemaran berbelanja di luar negeri ini sah-sah saja. Sayangnya, tanpa disadari, dengan membawa barang dari luar negeri, para penumpang sebenarnya telah melakukan kegiatan impor. Sementara di sisi lain masih banyak ditemukan penumpang yang belum mengetahui ketentuan barang bawaan penumpang yang berlaku di Indonesia.

Direktur Teknis Kepabeanan, Fajar Doni mengatakan, tujuan dari ketentuan impor bawaan penumpang adalah untuk memberi prinsip keadilan dan perlindungan industri dalam negeri. Jika barang bawaan penumpang dengan batas nilai tertentu tidak dikenakan bea masuk dan pajak, sedangkan barang produksi dalam negeri dikenakan pajak, maka industri dalam negeri tidak akan dapat bersaing dari sisi harga. “Hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan,” kata Fajar.

Dijelaskan Fajar lebih lanjut, barang bawaan penumpang memang menjadi salah satu obyek pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sebagai *industrial assistance* dan *community protector*. Selain membantu industri dalam negeri, DJBC juga bertugas melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang konsumsinya dibatasi, dilarang, atau berbahaya. Misalnya narkoba, zat psikotropika, dan prekursor yang juga sering menggunakan jalur barang penumpang. “Bukan hanya memperkuat daya saing, ketentuan ini juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kegiatan perdagangan dalam negeri,” ujar Fajar.

Menanggapi hal tersebut, ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, penentuan nilai batas barang bawaan penumpang yang adil harus dilakukan berdasarkan riset yang benar sesuai kondisi saat ini. Dengan begitu, aturan ini tidak membuat penumpang merasa diperangkap dan malah membuat keributan baru di bandar udara. “Kalau barang yang dibawa memang mencolok seperti tas senilai Rp200 juta, *okelah* harus ada justifikasi. Tetapi kalau misalnya hanya sekedar telepon genggam senilai Rp10 juta, menurut saya menjustifikasinya harus lebih bijak,” tukas Hariyadi.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Tutum Rahanta menambahkan, melindungi industri dalam negeri sebenarnya bisa dengan jalan lain, misalnya dengan menentukan regulasi yang membuat industri menjadi lebih

efisien. Contohnya, ada pengusaha ritel yang membuka keagenan dan distributor salah satu prosuk telepon seluler. Namun, aturan yang ada membuat verifikasi usahanya membutuhkan waktu yang lama sehingga barang tersebut baru masuk Indonesia dua periode berikutnya. “Kalau begitu ya orang berbondong-bondong mencarinya di luar negeri,” tukas Tutum. “Kalau industri dalam negeri dari hulu ke hilir sudah punya segalanya, siapa yang mau belanja di luar negeri? Apalagi jika harganya kompetitif dan produknya sudah yang terbaru,” katanya.

Tutum menuturkan, sebagai pengusaha ritel ia merasa sudah dilindungi berkali-kali dan tidak keberatan jika batas nilai barang bawaan penumpang disesuaikan. Menurutnya, pengawasan barang bawaan penumpang menyangkut banyak sektor, sehingga bisa jadi berlebihan jika hanya ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri. “Saya harus rasional. Beli satu sepatu olahraga saja kan sudah sekitar Rp2 juta. Selain itu, jika ada barang kebutuhan pribadi yang tidak tersedia di Indonesia, saya juga harus memahami kesulitan orang,” tuturnya.

Untuk kenyamanan setiap pihak, Hariyadi mengusulkan untuk dibuat semacam pencatatan uang dan barang masuk dan keluar. Catatan tersebut kemudian disesuaikan dengan profil penumpang dan SPT tahunannya. “Prinsipnya masyarakat membayar PPh pribadi. Kalau kemudian dia mau belanja itu urusan pribadinya, *dong*. Kalau jumlahnya tidak masuk akal untuk keperluan pribadi dan penghasilannya, baru kita saring lagi,” ujar Hariyadi. “Selain menghindari pungutan liar dan keributan yang tidak perlu, negara juga tidak akan kehilangan profil Wajib Pajak yang sebenarnya,” ujar Hariyadi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyampaikan Kementerian Keuangan akan mengevaluasi kembali aturan-aturan pembatasan barang bawaan penumpang, baik dari sisi jumlah, nilai harga, dan volumenya. Selain itu, Menkeu juga menginginkan agar prosedur penentuan bea masuk dan pajaknya disederhanakan dengan mengacu pada praktik-praktik terbaik internasional dan pendapatan perkapita.

Teks Irma Kesuma



MENILIK KEMBALI ATURAN BARANG IMPOR

Beberapa waktu terakhir, media dan masyarakat ramai memperbincangkan tentang peraturan bea masuk dan pajak impor. Di tengah maraknya bisnis perdagangan *online*, sebagian masyarakat belum mengetahui tentang ketentuan barang impor yang sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010. Kini, DJBC terus mensosialisasikan serta mengkaji ulang keefektifan penerapan kebijakan tersebut di lapangan. Berikut petikan wawancara Media Keuangan dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, mengenai seluk beluk aturan barang bawaan penumpang.

Dirjen Bea
Cukai Heru
Pambudi.

Foto
Langgeng
Wahyu P.

Apa evaluasi pelaksanaan PMK Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa Penumpang?

Kami melakukan tindakan preventif dan represif dalam menindaklanjuti kebijakan ini. Salah satu langkah efektif yaitu dalam bentuk sosialisasi dan edukasi kepada pengguna jasa, khususnya dengan menggunakan media sosial.

Sosialisasi melalui media *online* ini dilakukan mengingat semakin tingginya penggunaan media sosial oleh masyarakat sehingga akan memudahkan penyebaran informasi terkait pelayanan dan pengawasan barang penumpang. Selain itu, pada saat keberangkatan penumpang ke luar negeri telah disediakan *banner*, pamflet, mupun selebaran yang menjelaskan ketentuan barang bawaan penumpang. Demikian juga saat kedatangan penumpang, kami bekerja sama dengan perusahaan penerbangan mengenai sosialisasi ketentuan dan pengaturan barang kiriman penumpang.

Selain penggunaan media sosial dan sosialisasi di bandara serta pelabuhan, penggunaan media elektronik, radio, televisi, surat kabar, serta sosialisasi atas ketentuan impor barang penumpang juga telah dilaksanakan.

Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menentukan ambang batas nilai barang penumpang?

Dapat kami sampaikan bahwa saat ini pemerintah berencana untuk melakukan perubahan terkait ketentuan barang bawaan penumpang dengan memperhatikan simplifikasi, percepatan pelayanan,

perubahan pengenaan batas barang pribadi penumpang yang diberikan pembebasan (*de minimis value*), dan pemberitahuan melalui sistem secara elektronik.

Terkait dengan revisi *de minimis value* tersebut, terdapat beberapa dasar pertimbangan antara lain komparasi *de minimis value* barang penumpang di Indonesia dengan negara-negara lain, nilai barang penumpang berdasarkan *customs declaration* pada beberapa bandara utama, dasar perhitungan bea masuk dan pajak, serta perhitungan *Consumer Index Price (CPI)* dan *Gold Price Index*.

Apa saja yang menjadi usulan stakeholders terkait kebijakan ini?

Harapan dari pengusaha ritel kepada DJBC sebenarnya adalah untuk mendapatkan perlindungan dari membanjirnya produk impor masuk ke Indonesia. Dengan penerapan ketentuan barang penumpang melalui PMK 188/2010, pengusaha ritel akan mendapatkan beberapa manfaat. Pertama, terproteksi dari pemasukan produk impor dari barang penumpang. Kedua, memperkuat daya saing terhadap produk impor. Ketiga, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kegiatan perdagangan dalam negeri.

Sebagaimana telah kami sampaikan, tujuan pengaturan barang penumpang adalah untuk menerapkan prinsip keadilan atas barang serupa dan memiliki fungsi sama yang diproduksi atau diperdagangkan di dalam negeri. Produk dalam negeri yang telah

memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut diharapkan dapat terproteksi dengan penerapan ketentuan barang penumpang.

Di masyarakat berkembang usulan agar pemerintah menaikkan ambang batas barang bawaan penumpang sebesar 10 kali lipat, bagaimana pendapat Bapak?

Pengenaan batas barang pribadi penumpang yang diberikan pembebasan (*de minimis value*) merupakan salah satu praktik yang lazim di dunia internasional. Sesuai standar yang direkomendasikan WCO (*World Customs Organization*) berdasarkan *The Revised Kyoto Convention*. *De minimis value* tersebut dilakukan dengan mempertimbangan perkembangan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Apabila batas nilai barang bawaan dinaikkan dengan nilai yang terlampau tinggi, maka akan menyebabkan jumlah impor barang konsumsi melalui barang bawaan penumpang akan semakin tinggi. Hal ini tentu memiliki dampak negatif bagi industri, distributor, dan pengusaha ritel barang sejenis yang berada di dalam negeri.

Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap penerimaan negara?

Jika barang bawaan penumpang tidak dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, sedangkan barang produksi dalam negeri dikenakan pajak, maka industri dalam negeri akan kalah bersaing. Hal ini tentunya tidak selaras dengan prinsip keadilan yang telah dijelaskan di atas.

Barang bawaan penumpang sebagai objek pengawasan DJBC merupakan salah satu fungsi DJBC sebagai *industrial assistance* dan *community protector*. Selain berfungsi sebagai pelindung industri dalam negeri, DJBC juga bertugas untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang larangan atau pembatasan, bahkan dari bahaya Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) yang juga sering menggunakan jalur barang penumpang untuk masuk ke Indonesia.

Teks Pradany Hayyu

Lukman Effendi,
Direktur Lelang,
DJKN.

Foto
Anas Nur
Huda

Paradigma Baru Pengelolaan Lelang

Ketika mendengar kata lelang, banyak orang mengonotasikannya dengan barang bekas bermasalah yang dijual murah. Padahal lebih dari itu, kegiatan lelang memberi manfaat bagi banyak pihak. Apa saja kontribusi lelang bagi perekonomian? Berikut petikan wawancara Media Keuangan dengan Lukman Effendi, Direktur Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.



Seperti apa sejarah perkembangan lelang?

Sejarah lelang di Indonesia dimulai tahun 1908 dengan ditetapkannya *Vendu Reglement*, sebuah peraturan lelang tertinggi pada masa Hindia Belanda. Artinya lelang sudah digunakan sebagai sarana resmi jual beli di Indonesia selama 108 tahun, meski praktek lelang sudah dimulai jauh sebelum *Vendu Reglement* ditetapkan.

Perkembangan lelang pada beberapa tahun terakhir ini sangat menggembirakan. Hal ini bisa dilihat dari 3 indikator utama yaitu realisasi frekuensi lelang, pokok lelang dan bea lelang. Sejak tahun 2010 pencapaian ketiga indikator tersebut selalu di atas target, bahkan menunjukkan *tren* yang meningkat setiap tahun.

Bila dilihat dari seluruh aktivitas lelang, penerimaan negara yang masuk ke APBN maupun APBD di atas Rp1 triliun setiap tahun. Bahkan pada tahun 2013 mencapai Rp1,82 triliun yang bersumber dari bea lelang, PPh, BPHTB, maupun pokok lelang.

Langkah apa yang diambil agar lelang lebih optimal?

Ibarat kapal, lelang juga harus mempunyai kompas penunjuk arah. Direktorat Lelang bekerja sesuai *roadmap* beserta rencana aksi lima tahunan. *Roadmap* 2014-2019 memuat 4 hal. Pertama, pada 2016 fokus pada penguatan proses bisnis dengan mengembangkan basis data yang andal dan penggunaan aplikasi pendukung. Kedua, pada 2017 fokus pada optimalisasi pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, pada 2018 fokus pada pemantapan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia. Terakhir, pada 2019 sudah bisa mencapai lelang yang aman, unggul, dan terpercaya.

Nah, dengan pola kerja yang terprogram tentunya akan lebih mudah untuk mencapai tujuan. Meski begitu, dalam praktiknya tentu *roadmap* tersebut

merupakan pedoman saja. Kami akan tetap mengutamakan kreativitas, inovasi, serta percepatan pencapaian target.

Bagaimana perkembangan e-auction saat ini?

Lelang secara elektronik atau *e-auction* merupakan lompatan besar. Kami akan terus melengkapi inovasi ini dengan fitur-fitur yang dibutuhkan. Menteri Keuangan (Menkeu) meminta agar pada 2018 seluruh lelang menggunakan *e-auction*. Hal ini didasari pada banyaknya manfaat yang diberikan. Proses tawar menawar oleh peserta lelang menjadi lebih mudah. Nilai pokok juga meningkat di atas batas yang ditetapkan. Selain itu, lelang menjadi efisien dan mengurangi moral hazard.

Secara teknis arahan Menkeu tersebut dapat dipenuhi. Namun, menurut hemat kami ada beberapa peraturan yang perlu direlaksasi. Misalnya regulasi pasal 1b *Vendu Reglement* jo 6 PMK 90/PMK.06/2016 menetapkan bahwa opsi pertama untuk memilih cara penawaran lelang ada pada penjual bukan pada KPKNL.

Di samping itu, sesuai *international best practices*, untuk objek lelang tertentu, penawaran lelang secara konvensional dengan kehadiran peserta masih menjadi pilihan menarik, mengingat masih banyak orang yang ingin hadir langsung dan menikmati prosesnya. Sebab itu, pada 2018 kami akan menggunakan *e-auction* 100 persen untuk lelang noneksekusi wajib BMN dan tetap mendorong permohonan lelang lainnya untuk menggunakan *e-auction*.

Seperti apa peran lelang dalam ekonomi nasional?

Saya paham sebagian masyarakat yang menganggap lelang itu jual barang secara murah. Persepsi itu tidak selalu tepat, meski tidak salah juga. Pemerintah kolonial sendiri menyadari arti penting lelang sehingga membuat regulasinya. Menurut saya, ada dua kontribusi lelang

dalam perekonomian nasional, yakni penerimaan negara dan kontribusi tidak langsung berupa manfaat lain.

Lelang mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk PNB berupa biaya administrasi dan bea lelang. Lelang juga berfungsi mengamankan pajak, seperti PPh dan BPHTB. Bahkan untuk lelang jenis tertentu seperti lelang BMN, rampasan negara, dan aset kelolaan Menteri Keuangan, penerimaan pokok lelang disetorkan ke kas negara.

Sebenarnya, mengumpulkan penerimaan negara bukan tujuan pokok, sebab pada dasarnya lelang merupakan tugas pelayanan. Namun, penerimaan lelang berkontribusi pada peran DJKN sebagai pusat penerimaan. Sebab itu, tidak berlebihan jika fungsi ini dikatakan memiliki peran yang signifikan.

Selain penerimaan, apalagi manfaat lain lelang terhadap ekonomi?

Selain fungsi penganggaran, lelang juga mempunyai fungsi privat sebagai instrumen jual beli. Lelang melancarkan perputaran dana transaksi, sebagaimana tercermin dari total pokok lelang yang pada tahun 2016 mencapai Rp13 triliun. Selain itu, uang dari transaksi lelang akan diputar oleh perbankan melalui pinjaman ke masyarakat. Aset-aset yang sebelumnya tidak berjalan optimal bisa dioperasikan kembali untuk kegiatan ekonomi.

Saat ini ada 3 jenis lelang yaitu lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib dan lelang noneksekusi sukarela. Tiap jenis lelang mempengaruhi perekonomian dengan cara berbeda. Misalnya untuk jenis lelang eksekusi mayoritas penjualnya adalah perbankan. Bagi perbankan lelang akan menurunkan tingkat *non performing loan* (NPL) atau kredit bermasalah yang berimplikasi pada kesehatan bank. Selain itu, dari terealisasinya lelang berarti bank akan mendapatkan dana segar dari kredit yang sebelumnya macet. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk



membiayai operasional bank ataupun dipinjamkan kembali kepada masyarakat.

Industri lelang juga akan semakin berkembang yang berakibat pada munculnya profesi lain yang terkait. Contohnya balai lelang, pejabat lelang kelas II, penilai, broker, jasa periklanan dan lain sebagainya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja.

Sejauh mana kontribusi lelang dalam menurunkan NPL?

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, per Desember 2016 NPL menunjukkan tren peningkatan dari tahun sebelumnya, namun ada perbaikan di akhir tahun 2016. Pada triwulan IV tahun 2016 NPL turun menjadi 2,93 persen dari sebelumnya 3,10 persen pada triwulan III. Meski menurun, jika dilihat dari nominalnya, NPL *gross* pada akhir tahun 2016 masih besar yaitu Rp128,1 Triliun.

Capaian pokok lelang tahun 2016 memang relatif kecil jika dibandingkan dengan nominal NPL *gross* akhir tahun 2016. Namun lelang juga memberi dampak tidak langsung bagi penurunan NPL melalui mekanisme pelunasan utang, restrukturisasi utang, dan kepatuhan membayar angsuran. Dampak tidak langsung ini cukup besar meski belum dapat dikuantitatifikasi.

Hal yang menarik adalah ada kecenderungan bahwa menurunnya tingkat NPL pada akhir 2016 berbanding lurus dengan meningkatnya kinerja lelang eksekusi pada akhir tahun 2016. Hal ini membangkitkan optimisme bahwa keberhasilan lelang eksekusi akan berdampak positif pada penurunan NPL, apalagi jika diperhitungkan dampak tidak langsungnya.

Bisakah lelang bersaing dengan e-commerce?

Lelang KPKNL lebih diarahkan untuk penegakan hukum dan pengamanan aset pemerintah. Pasar lelang KPKNL ada di situ, walau meningkatkan peran KPKNL tetap menjadi kewajiban kami. Namun perlu juga diingat bahwa DJKN merupakan instansi pembina balai lelang dan pejabat lelang kelas II. Merekalah yang harus berebut peluang untuk masuk dalam persaingan bisnis lelang modern.

Kami sedang mengkaji cara-cara baru dalam menawarkan lelang, salah satunya dengan *instant auction* yang lebih sederhana. Kami juga telah mengkaji kemungkinan menerapkan sistem *extended auction* yaitu lelang dengan jangka waktu panjang sampai objek lelang terjual.

Saat ini lelang dilaksanakan pada hari, tanggal, dan jam tertentu. Jika pada jam tersebut tidak ada yang mengajukan penawaran maka lelang dinyatakan selesai. Objek lelang diturunkan dari etalase *e-auction*. Penjual harus mengajukan permohonan lelang ulang jika masih ingin menjual barang tersebut. Hal ini tentu butuh waktu dan biaya lagi. Dengan sistem *extended*, objek lelang akan tetap siap jual di etalase sampai terjual. Regulasi sedang kita susun. Teknologi sedang kita siapkan. Inilah salah jawaban untuk bersaing dengan *e-commerce*.

Teks Irma Kesuma Dewi

Suasana lelang.

Foto
Dok. DJKN

KPKNL Bukittinggi Mendayung Sukses Bersama GADANG

Menjejakkan kaki di kota Bukittinggi membuat siapapun terpesona dengan keindahan panorama alamnya. Hawa yang sejuk dan pemandangan kota yang banyak dipenuhi ornamen rumah gadang membuat kami jatuh hati pada kota yang berjarak sekitar dua jam dari kota Padang ini. Kami pun tak sabar ingin mengetahui lebih banyak tentang salah satu kantor perwakilan Kementerian Keuangan yang berprestasi di kota ini.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi merupakan salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang bisa dijadikan rujukan kantor dengan pelayanan terbaik kepada *stakeholders*. Ditemui di kantornya, Kepala KPKNL Bukittinggi, Syukriah HG, menjelaskan seluk beluk unit yang dipimpinya. “Kami berusaha meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders* dengan memperbaiki sarana prasarana kantor, membuat inovasi melalui *website sip-gadang.com*, inovasi *one hour service* dari pelayanan lelang, dan sebagainya,” jelas Syukriah dengan ramah.

Melalui *website sip-gadang.com*, para *stakeholders* dapat melihat berbagai informasi terbaru terkait pelayanan pengelolaan kekayaan negara, lelang, dan penilaian. Sedangkan dalam layanan *one hour service*, pemohon lelang dapat memperoleh kepastian jadwal lelang dalam

waktu satu jam setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap. Untuk membantu masyarakat memahami kebijakan KPKNL, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara berinovasi memproduksi sejumlah video tutorial penggunaan aplikasi pengelolaan kekayaan negara.

Menuju WBK/WBBM

Kini, KPKNL Bukittinggi menjadi salah satu kantor yang sedang menyiapkan program pembangunan Zona Integritas melalui predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Syukriah menegaskan, KPKNL Bukittinggi tengah melakukan internalisasi program pembangunan Zona Integritas tersebut kepada seluruh jajaran pegawai.

Total terdapat enam area yang perlu mendapat perhatian khusus dalam menuju predikat WBK/WBBM. Keenam area tersebut antara lain manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan publik.

Pada tahun 2016, KPKNL Bukittinggi sukses meraih predikat Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) di lingkungan Kementerian Keuangan. Bagi Syukriah, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan yang menuntut tanggung jawab lebih untuk mempertahankannya. Apresiasi

tersebut merupakan momentum bagi seluruh jajaran KPKNL Bukittinggi untuk semakin menuju kesempurnaan.

Menilik berbagai program kegiatan KPKNL Bukittinggi, tak heran apabila kantor ini mendapat berbagai apresiasi. Salah satu kegiatan yang patut dibanggakan yaitu acara Lelang Expo 2017 yang diselenggarakan bulan April lalu di pelataran Jam Gadang. Seperti yang kita ketahui, Jam Gadang merupakan simbol khas Sumatera Barat yang berlokasi di jantung kota Bukittinggi. Tanpa mengundang massa secara khusus pun, masyarakat akan berbondong-bondong datang ke lokasi tersebut.

Acara lelang ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Lelang Expo 2017 yang bekerja sama dengan pihak perbankan ini bertujuan untuk memasyarakatkan lelang. Ke depan, acara yang berlangsung sukses ini akan menjadi agenda tahunan KPKNL Bukittinggi dan menjadi panutan untuk diadakan acara serupa di KPKNL lainnya.

Bangga dengan GADANG

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, jajaran KPKNL Bukittinggi selalu berpatokan pada visi, misi, serta Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Di samping itu, seluruh jajaran pegawai pun bangga menjunjung tinggi moto KPKNL Bukittinggi, yaitu GADANG. GADANG merupakan singkatan dari gigih, penuh



Kepala KPKNL Bukittinggi, Syukriah HG

Jajaran Pejabat KPKNL Bukittinggi.

KPKNL Bukittinggi tampak depan.

Foto Venggi O. Ovisa.



antusias, dedikasi tinggi, memegang teguh amanah, memberikan rasa nyaman pada pengguna jasa dalam rangka menciptakan *good governance*. “GADANG ini lah yang membangun kebersamaan kami. Untuk menuju sukses, kita harus mendayung ke arah yang sama,” katanya.

Kini, jumlah sumber daya manusia di KPKNL Bukittinggi terdiri dari 25 orang, satu orang diantaranya sedang menjalani tugas belajar. Seluruh pegawai terbagi ke dalam tujuh seksi yang dipimpin oleh seorang kepala seksi (kasi). Tujuh seksi tersebut antara lain seksi piutang negara, pelayanan penilaian, pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang, hukum dan informasi, kepatuhan internal, dan subbagian umum.

Mengingat sebagian besar pegawai merupakan warga perantauan, maka KPKNL Bukittinggi aktif menyelenggarakan kegiatan yang bersifat kekeluargaan. “Kami rutin mengadakan kegiatan senam pagi dan pengajian. Bahkan sebulan sekali kami melakukan senam bersama teman-teman DJPB dan DJP,” jelas Syukriah. Selain dapat mendekatkan jalinan kekeluargaan antarpegawai, kegiatan tersebut bermanfaat untuk mengobati kerinduan para pegawai terhadap kampung halaman.

Kantor yang berlokasi di Jalan Muhammad Yamin Kota Bukittinggi ini melayani sekitar 400 lebih satuan kerja (satker). Banyaknya satker justru mampu meningkatkan kualitas pelayanan KPKNL Bukittinggi. Hal ini dibuktikan dengan terpusatnya

informasi mengenai aset dan database para satker pada *website www.sip-gadang.com*.

Para pengguna jasa sangat dimudahkan dengan informasi yang tersedia pada halaman *website* tersebut. Terlebih satker KPKNL Bukittinggi tersebar di delapan daerah di Sumatera Barat, yaitu kota Bukittinggi, kota Padang Panjang, kota Payakumbuh, kabupaten Agam, kabupaten Tanah Datar, kabupaten Lima Puluh Kota, kabupaten Pasaman, dan kabupaten Pasaman Barat.

Ke depan, KPKNL Bukittinggi ingin terus mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru lainnya. Organisasi yang ingin maju tidak bisa hanya diam saja atau stagnan. “Jika pencapaian yang sudah diraih hanya bisa dipertahankan, maka akan jadi usang. Harus ada ide, kreasi, dan inovasi baru lagi,” tutur Syukriah menutup pembicaraan dengan Media Keuangan.

Teks Pradany Hayyu

Dari Nyawa Terancam Hingga Miliaran Tawaran

R. Patrick Wahyu D,
Inspektur Jenderal Bidang VI
Inspektorat Jenderal

Derap langkah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) itu menderu di atas lapangan upacara Istana Negara. Langkah tegas dan tegap menjadi identitas kedisiplinan dan nasionalismenya. Wibawa para putra-putri terbaik bangsa tersebut menjadi

penanda bahwa bangsa ini tidak akan pernah kehilangan penerusnya. Beberapa anggota Paskibraka era 1980-an tersebut kini menjadi satu dari sembilan orang yang mengabdikan dirinya di Kementerian Keuangan. Ialah R. Patrick Wahyudwisaksono, Inspektur V Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan. Ia menjadi salah satu lulusan Paskibraka Nasional yang menjadi auditor di Kementerian Keuangan. Kedelapan lulusan Paskibraka angkatannya ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kiprahnya di dunia baris-berbaris sebenarnya tak lepas dari keinginannya mengabdikan kepada bangsa dan negara. Walaupun sempat menjadi cadangan pasukan, ia pun berhasil menunjukkan kemampuannya sehingga terpilih sebagai pasukan utama untuk mengibarkan Sang Saka di Istana Negara pada hari peringatan Kemerdekaan RI ke-35. Setelah tepat tiga puluh lima tahun berselang, ia pun ditunjuk menjadi komandan upacara peringatan Kemerdekaan RI ke-70 di Lapangan Banteng Kementerian Keuangan. Bahkan, saat ini ia masih meluangkan waktunya untuk melatih para pegawai baru Itjen agar bisa menjadi pasukan perangkat upacara di Kementerian Keuangan.

Hampir mati

Menjadi auditor dan ikut serta dalam melakukan reformasi di tubuh Kementerian Keuangan memang bukan pekerjaan yang mudah. Berbagai tantangan baik dari eksternal maupun tantangan dari internal pun harus ia hadapi. Tak luput hingga tiga kali ia terancam hampir kehilangan nyawa dalam melaksanakan tugasnya. Jejak kariernya dimulai ketika Patrick masuk di Inspektorat Umum Itjen pada tahun 1985 yang merupakan cikal bakal Inspektorat Bidang Investigasi sekarang. Pada waktu itu ia diberi tugas untuk melakukan pengawasan di bidang piutang negara, bidang lembaga keuangan, serta investigasi. Karena bidang kerjanya yang luas, ia pun dituntut untuk memiliki berbagai pengetahuan dan kemampuan di berbagai disiplin ilmu. Untuk itu, ia sempat belajar ilmu penilaian (*appraisal*), penaksir pegadaian, bahkan ilmu pengelolaan bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Kisah perjuangan melawan koruptor pun dimulai ketika ia diperbantukan ke

dalam Tim Gabungan Restitusi Pajak yang beranggotakan gabungan lintas Kementerian/Lembaga, termasuk Polri dan TNI. Tugasnya tidak mudah. Ia dan tim harus bisa mengungkap kasus faktur pajak bodong di Medan dan di Jakarta. Kondisi keamanan yang masih belum stabil saat itu mengakibatkan ia harus berhadapan dengan berbagai risiko keamanan, termasuk kematian. Bahkan ia juga harus sering melakukan penyamaran dan sembunyi-sembunyi untuk melindungi keselamatan dirinya.

Selanjutnya, pada tahun 1992 Patrick dipindahtugaskan ke Inspektorat II yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di tempat itu, ia bekerja cukup lama sehingga ia memperoleh ilmu yang dalam terkait penilaian PBB. Dengan begitu, ia memiliki keahlian yang komprehensif di bidang penilaian aset dan PBB. Hal tersebut juga menjadikan dirinya diundang menjadi narasumber di Direktorat Jenderal Lelang Negara (DJPLN) untuk memberikan pemaparan terkait perbedaan metode penilaian aset dengan PBB yang memang belum banyak orang yang paham.

Ditawar satu dan lima miliar

Tingkat risiko pekerjaan yang tinggi dan banyaknya pihak yang memusuhinya mendorong lawannya untuk memberikan tawaran uang yang fantastis. Dirinya pernah ditawar satu miliar pada tahun 1992 hanya untuk melepaskan satu kasus perpajakan. Namun berkat integritas yang kuat, ia dan tim tetap menyelesaikan pekerjaan dengan jujur dan bersih.

Selanjutnya pada tahun 2005, ia mendapat tugas khusus untuk mengawal reformasi di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tugas DJBC yang berkaitan langsung dengan pengusaha di bandara atau pelabuhan mengakibatkan risiko korupsi yang tinggi. Tidak hanya

itu, risiko keselamatan juga menjadi tinggi dengan adanya oknum dan musuh dari internal dan eksternal. Kali ini, ia sempat diberikan cobaan integritas berupa tawaran lima miliar untuk pelepasan kasus penjualan ilegal. Namun demikian, ia menolak tawaran tersebut karena ia memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DJBC dan Kementerian Keuangan.

Tari dan pencak silat

Di balik keberaniannya dalam menjalankan tugas yang berat, Patrick memiliki sisi lain yang menarik. Ia sangat tertarik dengan dunia seni, terutama seni tari. Awal ia mengenal tari berasal dari seringnya ia ikut kegiatan karawitan ayahnya. Dari kegiatan itu, ia mulai mengenal tarian dan beberapa guru tari yang kala itu sedang melatih muridnya. Mengetahui bakat Patrick, ayahnya menyekolahkan ke sekolah musik Yamaha Indonesia. Di tempat ini, Patrick mengenal musisi ternama seperti Erwin Gutawa, Dodo Zakaria, dan Ermil yang merupakan teman belajar musiknya.

Dalam perjalanan seninya, ia akhirnya fokus memilih tari sebagai bidang yang ditekuni. Yang menarik adalah Patrick selalu belajar jenis tarian dari sumber orang pertama. “Jadi tidak pernah dari orang kedua atau ketiga. Jadi misalnya tari Jawa ya dari sumber aslinya. Beberapa guru-guru terkenal dari Solo, dari Yogya, seperti S. Sardjono, Sentot S. Maridi, itu guru saya. Bosen tari Jawa, pindah ke tarian Minang. Jadi saya bisa semua tari”, cerita Patrick dengan semangat. Bahkan, saat ini ia mempunyai murid dan sanggar tari sendiri yang ia beri nama Putih Melati.

Patrick juga sempat berlatih ilmu bela diri pencak silat. Bahkan ia sampai mendalami ilmu tersebut dan mampu



Berbagai kegiatan Patrick di luar kantor.

Foto dok. Pribadi

mencapai level tertinggi berupa ban hitam. Setelah masuk ke Kementerian Keuangan, ia dan delapan temannya menginisiasi kegiatan latihan pencak silat yang diberi nama Merpati Putih Kementerian Keuangan. Ia juga sempat melakukan demonstrasi Merpati Putih di depan Menteri Keuangan, Mar’ie Muhammad. Menambah deretan bakatnya, ia juga pernah bergabung dengan tim gerak jalan cepat, dan lari.

Cintai pekerjaan sepenuh hati

Sebagai orang tua, ayah Patrick, R.J. Sukisno, dan ibunya, R.R. Sri Martuti, selalu menanamkan nilai agar ia senantiasa bekerja dengan hati. Ayahnya yang berlatar belakang militer juga selalu menjunjung tinggi integritas. Hal itulah yang menginspirasi Patrick dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor. Bahkan keberanian dari ayahnya juga turut menurun ke jiwa Patrick dalam menghadapi koruptor.

“Bapak saya jujur, jujur banget. Jadi dia itu dari dulu menanamkan kejujuran ke kita. Tidak apa-apa salah asal kita jujur. Jadi buat dia apabila kita melakukan kesalahan itu tidak apa-apa asal kita jujur. Tapi ya kalau kejujuran itu udah dikhianati mungkin ya sudah tidak ada nilainya. Jadi pertama nilai kejujuran, integritas itu ya. Kedua bekerjalah dengan hati dan ketiga cintailah pekerjaan itu dengan sepenuh hati di manapun kamu berada”, ceritanya.

Terkait dengan penugasan yang memiliki tingkat risiko tinggi, Patrick selalu mengutamakan keamanan dari istrinya, R.R. Siswandhini, dan kedua anaknya, Farras Malik Bayu Wicaksono dan Harits Yusuf Hartanto. Ia merupakan sosok ayah tegar dan berkomitmen meskipun ia sempat mengalami kehilangan salah satu anaknya karena sakit. Meski begitu, ia selalu bertanggung jawab atas keluarga dan pekerjaannya. Ia berusaha agar selalu merasa bahagia dan bersyukur atas takdir yang telah diberikan kepadanya.

Harapan

Sementara itu, Patrick memiliki harapan yang besar terhadap institusinya. Ia ingin agar Inspektorat Jenderal di Kementerian Keuangan bisa menjadi Itjen yang di atas rata-rata. Ia juga mempunyai harapan agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat menjalin sinergi kerja sama yang baik baik dari tingkat Kementerian dan Lembaga di pusat, sampai dengan APIP di pemerintah daerah.

Untuk dirinya sendiri, ia memiliki harapan agar dapat berbagi rejeki dengan lebih banyak orang. “Saya melihat semakin banyak orang yang perlu saya bantu. Kalau pun saya mendapatkan rejeki, bukan untuk saya saja kok. Harus banyak yang saya *restore*. Jadi rejeki itu bukan buat kita, tetapi buat dialirkan lagi. Supaya kita bisa diisi lagi. Itu saja”, harapnya.

Teks Abdul Aziz

Potensi Akselerasi Investasi atas Penurunan Suku Bunga

“Pelemahan Rupiah diperkirakan bersifat temporer.”

Di luar perkiraan sebagian besar pelaku pasar, pada September 2017 lalu, Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuannya, yaitu *7-Day (Reverse) Repo Rate* atau 7DRRR. Meskipun ditujukan untuk mengakselerasi investasi, Pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus memperhatikan kecepatan penurunan 7DRRR. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tren normalisasi suku bunga acuan Amerika Serikat (AS).

Kebijakan moneter AS masih ketat

Pada September 2017, FFR dipertahankan berada di kisaran 1-1,25 persen guna mengakomodasi perkembangan perekonomian AS yang relatif moderat terutama konsumsi rumah tangga, serta stabilnya tingkat inflasi di bawah 2 persen. Selain itu, dampak ekonomi dari bencana alam di AS juga diperkirakan menahan perkembangan perekonomian negara tersebut dalam jangka pendek.

Meskipun FFR bertahan, the Fed menyatakan bahwa pihaknya akan memulai program pengurangan neracanya pada Oktober 2017.

Kebijakan pengetatan moneter melalui normalisasi neraca ini diperkirakan akan berdampak kepada pengurangan likuiditas dan peningkatan suplai surat berharga AS di pasar

keuangan global yang pada akhirnya akan meningkatkan imbal hasil surat berharga AS. Hal ini berpotensi menyebabkan aliran dana yang selama ini masuk ke negara berkembang akan kembali ke AS.

Pada paruh kedua September 2017, terdapat perkembangan kebijakan fiskal AS yang berpotensi mengubah percepatan normalisasi kebijakan moneter AS ke depan. Hal tersebut ialah pengajuan proposal reformasi perpajakan Presiden AS Donald Trump ke parlemen di AS. Reformasi ini mencakup usulan pemotongan tarif pajak perusahaan serta penyederhanaan dan pemotongan tarif pajak perorangan. Pemotongan ini diperkirakan akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi AS serta meningkatkan kemungkinan percepatan normalisasi FFR. Hal ini tercermin dari konsensus atas probabilitas kenaikan FFR pada akhir 2017 yang meningkat dari 20 persen pada Agustus menjadi 70 persen pada September 2017.

Indikasi Diturunkannya 7DRRR

Di tengah ekspektasi kenaikan FFR, 7DRRR justru diturunkan sebanyak 25 basis poin menuju level 4,25 persen pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 22 September 2017. Dengan demikian, sejak Januari hingga September 2017 total pemotongan 7DRRR sudah mencapai 100 basis poin.

Dari sisi global, terdapat beberapa hal yang mendukung dibutuhkannya penurunan 7DRRR. Pertama, menurunnya tingkat ketidakpastian di perekonomian global. Hal ini tercermin salah satunya melalui indikator fluktuasi pasar keuangan di AS yaitu Chicago Board Options Exchange's Volatility Index (VIX) yang menurun tajam terutama meninggalkan akhir 2015, saat FFR mulai secara efektif dinaikkan.

Kedua, dari sisi domestik, penurunan 7DRRR berkaitan dengan upaya menstimulasi perekonomian. Selain sebagai alat untuk mempengaruhi ekonomi melalui pengendalian likuiditas, 7DRRR sebagai suku bunga acuan dari BI juga berfungsi merespons perkembangan perekonomian. Pemangkasan 7DRRR diindikasikan merespons kebutuhan akan pemacu pertumbuhan seiring performa konsumsi yang pertumbuhannya di bawah 5 persen (*yoy*) pada akhir kuartal kedua 2017.

Di samping itu, relatif stabilnya Rupiah dan rendahnya tingkat inflasi umum di tahun 2017 juga memperlebar ruang pelanggaran kebijakan suku bunga. Dari sisi global, redanya tingkat ketidakpastian serta masih dilaksanakannya kebijakan moneter *unconventional* longgar, yaitu *quantitative easing* oleh negara maju lain seperti Eropa dan Jepang, disinyalir menambah keyakinan BI untuk menurunkan suku bunga.

Stabilitas Rupiah

Meskipun baik bagi kondisi perekonomian domestik saat ini yang masih memerlukan stimulus lanjutan, perlu diwaspadai dampak dari penurunan suku bunga acuan yang cukup cepat di tahun 2017 terhadap stabilitas Rupiah dan likuiditas perbankan.

Pada akhir September 2017, Rupiah ditutup pada level Rp13.492 per dolar AS. Setelah mengalami apresiasi di bulan-bulan sebelumnya, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada September 2017 mengalami sedikit depresiasi. Dibandingkan posisi akhir Agustus 2017, terjadi depresiasi 1,1 persen. Sementara secara rata-rata kumulatif, terjadi depresiasi 0,4 persen dibanding tahun 2016.

Salah satu indikator pemicu turunnya *capital inflow* menurut Bank for International Settlements (BIS) adalah turunnya perbedaan suku bunga antara negara maju, dalam hal ini AS, dengan negara berkembang, dalam hal ini Indonesia. Selain itu, dengan suku bunga acuan 4,25 persen dan tingkat inflasi 3,72 persen (*yoy*), suku bunga acuan riil menjadi sangat rendah dan mendekati nol. Berdasarkan pengalaman historis, ketika suku bunga riil berada di bawah nol, arus dana asing masuk (*capital inflow*) menurun sehingga mempengaruhi stabilitas Rupiah.

Selain itu, pelemahan nilai tukar juga disebabkan oleh faktor eksternal. Hal yang sama terjadi di Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand pada paruh kedua September 2017. Tren ini mengonfirmasi adanya penguatan dolar AS mengikuti arah perkembangan kebijakan fiskal AS.

Meskipun melemah, nyatanya pada Januari-September 2017 masih terdapat *capital inflow* di pasar modal Indonesia

Pasar instrumen jangka panjang masih didominasi BUMN besar dan perusahaan swasta tertentu

Foto
Habibullah
Yusuf

sebesar Rp142,08 triliun. Masih tingginya minat investor asing, salah satunya didukung oleh positif dan terjaganya outlook perekonomian dan peringkat kredit Indonesia di tahun 2017. Selain itu, masih tingginya perbedaan tingkat suku bunga di Indonesia dan negara-negara maju di luar AS, seperti Jepang dan Eropa yang bahkan memberlakukan kebijakan suku bunga negatif, turut menopang *capital inflow* ke Indonesia secara umum.

Penyaluran kredit belum signifikan

Meski 7DRRR sudah turun signifikan, pertumbuhan penyaluran kredit belum sepenuhnya membaik. Pertumbuhan kredit bulan Juli 2017 sebesar 8,0 persen (yoy), sama dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penyaluran kredit.

Penurunan suku bunga acuan hanyalah salah satu faktor yang mempengaruhi dari sisi *supply*. Selanjutnya, penurunan ini pertama-tama akan mempengaruhi suku bunga simpanan. Di samping faktor lainnya, seperti tingkat likuiditas perbankan dan tingkat imbal hasil SUN sebagai alternatif penempatan dana bagi nasabah, sejak 2016, suku bunga simpanan sudah turun sebanyak 143 basis poin merespons penurunan suku bunga acuan sebesar 325 basis poin. Dampak penurunan tajam ini di tengah kebijakan *capping* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu diperhatikan. Sebab hal ini berpengaruh pada pertumbuhan dana pihak ketiga sebagai sumber penyaluran kredit.

Selanjutnya, suku bunga simpanan sebagai biaya dana akan mempengaruhi suku bunga kredit. Sama halnya dengan kasus di suku bunga simpanan, biaya dana tidak berpengaruh secara proporsional. Hal ini disebabkan adanya

faktor di luar biaya dana yang mempengaruhi suku bunga kredit, yaitu *profit margin* dan premi risiko (*rasio kredit macet*).

Lebih dari itu, beberapa berpendapat bahwa suku bunga kredit lebih *sticky* dari suku bunga simpanan karena sifatnya yang berbasis kontrak. Dengan struktur perbankan yang terkonsentrasi pada beberapa bank, efektivitas transmisi suku bunga ke pasar akan terkendala sehingga membutuhkan waktu untuk menimbulkan pengaruh. Hal ini dapat dilihat dari penurunan suku bunga kredit dari tahun 2016 yang hanya sebesar 108 basis poin.

Faktor lain perlu perhatian

Untuk mempercepat akselerasi penyaluran kredit, penurunan suku bunga acuan harus diiringi dengan kemampuan pengawasan mikro perbankan oleh OJK agar rasio kredit macet terus dapat ditekan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif baik meski belum sesuai ekspektasi, rasio kredit macet seharusnya dapat dikelola.

Pada sisi lain, pemerintah juga perlu mendorong investasi di luar perbankan seperti pasar modal. Pemerintah perlu melakukan pendalaman pasar, misalnya dengan meningkatkan aksesibilitas sektor usaha ke pasar modal serta memastikan tersedianya instrumen yang dapat membiayai investasi yang bersifat jangka panjang. Saat ini, pasar instrumen jangka panjang masih didominasi oleh BUMN besar dan perusahaan swasta tertentu, sehingga membutuhkan pendalaman secara intensif.

Teks Adelia Pratiwi
Pegawai Badan Kebijakan Fiskal



Komentar Pakar



Damhuri Nasution,
Head of Economic Research and
Senior Econometrician, PT Danareksa
Research Institute

Terdapat sedikitnya tiga isu yang membuat Rupiah melemah. Pertama, pidato Gubernur the Fed Janet Yellen yang mengatakan bahwa meskipun inflasi di AS relatif masih terjaga dibawah 2 persen, normalisasi suku bunga acuan the Fed akan tetap dilakukan. Hal ini mengakibatkan kenaikan pada suku bunga.

Kedua, proposal reformasi pajak Presiden AS Donald Trump sudah siap untuk dibawa ke parlemen guna mendapatkan persetujuan dari DPR-nya. Meskipun belum tentu disetujui, pasar menilai ada kemajuan. Selanjutnya, apabila kemajuan ini bisa dieksekusi, perekonomian AS akan tumbuh dengan pesat. Hal ini kemudian dapat diikuti dengan kenaikan suku bunga acuan yang cukup agresif.

Ketiga, suasana geopolitik di semenanjung Korea yang semakin panas membuat sebagian investor kembali ke investasi di negara-negara *safe haven*. Dengan demikian, hal yang mendorong pelemahan rupiah adalah faktor sentimen yang sesungguhnya belum tentu akan terjadi. Sementara itu, faktor fundamental makroekonomi kita cenderung semakin membaik, seperti inflasi yang terjaga, current account deficit yang terkendali, serta prospek pertumbuhan ekonomi yang semakin bagus. Oleh sebab itu, pelemahan Rupiah itu bersifat temporer.

Semangat Singkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dalam Aplikasi KRISNA

www.krisna.bappenas.go.id



Merebut Momentum Pemulihan Ekonomi Global

Teks Rudi Handoko

Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan *)

Episode Krisis Keuangan Global (*Global Financial Crisis*) pada 2007-2009 sudah lewat 10 tahun. Namun, imbas berupa pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya, masih dirasakan hingga kini. Meski demikian, Lembaga Moneter Internasional (IMF) dalam laporannya, *World Economic Outlook* (WEO) pada Oktober 2017 memunculkan optimisme terkait pemulihan ekonomi global. Disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada 2017 dan 2018 adalah sebesar 3,6 dan 3,7 persen atau menguat 0,1 persen dibandingkan proyeksi WEO pada April dan Juli 2017. Optimisme ini bersumber dari kenaikan investasi, perdagangan, produksi industri, serta penguatan tingkat kepercayaan pebisnis dan konsumen.

Optimisme juga menjalar ke volume perdagangan dunia yang diproyeksi tumbuh 4,2 persen (2017) dan 4,0 persen (2018). Indeks harga komoditas diperkirakan meningkat 12,3 persen pada 2017, meski turun sebesar 0,1 persen pada 2018. Harga minyak diperkirakan naik dari USD43 per barel pada 2016 menjadi USD50 per barel pada 2017 dan 2018. Begitupun komoditas selain bahan bakar, diperkirakan menguat pada 2017-

2018 karena besarnya permintaan logam dari Tiongkok, ketatnya pasokan makanan, serta kenaikan secara umum dalam permintaan global.

Optimisme turut menular ke negara-negara di ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam) dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,2 persen pada 2017 dan 2018. Kenaikan proyeksi disebabkan oleh permintaan eksternal dari Tiongkok dan Eropa yang lebih kuat dari perkiraan sebelumnya. Untuk Indonesia, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen (2017) dan 5,3 persen (2018).

Optimisme bagi Indonesia juga diperoleh lewat laporan yang dirilis PricewaterhouseCoopers (PwC) pada Februari 2017. Laporan berjudul "*The Long View, How Will the Global Economic Order Change by 2050?*" menaikkan peringkat ekonomi Indonesia dari posisi ke-8 pada 2016 (PDB sebesar USD3.028 miliar) menjadi posisi ke-5 pada 2030 dan posisi ke-4 pada 2050 (PDB sebesar USD5.424 miliar dan USD10.502 miliar). Kondisi eksternal Indonesia juga berada pada kondisi optimis, ditunjukkan tingginya kepercayaan investor yang tercermin pada surat utang Indonesia dengan

peringkat layak investasi (*investment grade*), surplus pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran, rendahnya defisit transaksi berjalan, dan makin kuatnya cadangan devisa dengan nilai di atas USD100 miliar.

Dampak Positif

Pemulihan ekonomi global berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Utamanya pada jalur perdagangan yang tercermin dari permintaan produk ekspor Indonesia oleh negara-negara yang mengalami pemulihan ekonomi. Harga komoditas internasional juga cenderung menguat, sehingga terjadi kenaikan volume dan nilai ekspor Indonesia.

Beberapa harga komoditas internasional yang menjadi andalan komoditas ekspor Indonesia perlu mendapat perhatian, seperti CPO, batu bara, minyak dan gas (migas), serta karet. Pergerakan indeks harga komoditas diperkirakan membaik selama rentang 2017-2022, meski masih lebih rendah dibandingkan masa *commodities super cycle*. Kenaikan ini menguntungkan Indonesia karena lebih dari 50 persennya adalah produk utama ekspor Indonesia berbasis sumber daya alam (SDA). Namun,



Harga komoditas internasional cenderung menguat, sehingga terjadi kenaikan volume dan nilai ekspor Indonesia.

Foto
Anas Nur Huda

struktur ekspor berbasis SDA berisiko saat terjadi gejolak harga komoditas internasional, sedangkan produk ekspor non SDA belum mampu mengambil alih.

Meski demikian, struktur ekspor nonmigas dengan migas dalam 10 tahun terakhir memperlihatkan peningkatan dari 79:21 pada 2006 menjadi 91:9 pada 2016. Artinya, ketergantungan Indonesia terhadap ekspor produk migas semakin berkurang, sehingga saat ada gejolak harga, tidak berdampak besar pada perekonomian.

Terkait dampak pemulihan ekonomi global terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) atau *Foreign Direct Investment* (FDI), maka perlu dipisahkan antara PMA yang berorientasi pasar domestik dengan yang berorientasi pasar ekspor. Keputusan PMA yang berorientasi pasar domestik didasarkan pada prospek jangka menengah bagi ekonomi domestik, bukan global, sehingga PMA jenis ini kemungkinan terus berlanjut karena besarnya potensi pasar Indonesia. Sementara keputusan pada PMA yang berorientasi ekspor didasarkan pada biaya tenaga kerja, kedekatan dengan bahan baku SDA (berbasis komoditas), kemurahan biaya lainnya dibanding tempat lain, serta potensi ekspornya. Maka, bila terjadi pemulihan ekonomi global dan penguatan harga komoditas, akan membuka peluang investor asing untuk meningkatkan PMA di Indonesia.

Sementara itu, globalisasi dan perkembangan teknologi informasi membuat sistem keuangan Indonesia semakin terintegrasi dengan sistem keuangan global. Hal ini berdampak pada kemudahan akses dalam memperoleh sumber pendanaan luar negeri. Namun, sistem keuangan Indonesia menjadi berisiko

dan rentan terhadap gejolak keuangan dunia.

Pemulihan ekonomi global juga berdampak positif pada sektor pariwisata dan remitansi. Perbaikan pada sektor pariwisata dapat menarik jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, sehingga meningkatkan penerimaan. Saat ini, wisatawan mancanegara di Indonesia masih didominasi lima negara, yaitu Singapura, Malaysia, Australia, Tiongkok, dan Jepang, sedangkan wisatawan dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa hanya 10 persen dari total wisatawan.

Perbaikan ekonomi global diharapkan turut memperbaiki remitansi tenaga kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan data Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), rata-rata proporsi remitansi TKI yang berasal dari Amerika dan Eropa pada 2010-2016 hanya sebesar 7 persen. Tiga besar sumber remitansi TKI adalah Malaysia (31 persen), Arab Saudi (30 persen), serta Hong Kong dan Tiongkok (16 persen). Perbaikan ekonomi di negara-negara sumber remitansi TKI ini berdampak positif bagi Indonesia.

Pada sisi fiskal, pemulihan ekonomi global menaikkan permintaan produk ekspor Indonesia dan penguatan pada harga komoditas global, yang pada gilirannya menaikkan laba perusahaan eksportir berbasis komoditas/SDA. Kenaikan laba ini akan meningkatkan penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. Hal ini makin mendukung kebijakan fiskal ekspansif lewat belanja infrastruktur, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi lagi.

Dampak positif pada ekonomi riil lainnya adalah perluasan kesempatan kerja, terutama sektor berorientasi ekspor. Perlu dicatat, dampak pemulihan ekonomi global ke ekonomi riil relatif lebih lama dibandingkan transmisi lewat sektor keuangan. Hal ini dikarenakan transaksi sektor riil didasarkan pada kontrak-kontrak yang bersifat mengikat dalam jangka menengah-panjang, sehingga bila terjadi *shock* pada ekonomi global, terdapat jeda waktu (*time lag*) sebelum mempengaruhi perekonomian riil.

Waspada Risiko

Salah satu risiko utama yang dapat menggagalkan momentum pemulihan ekonomi global adalah rendahnya produktivitas. Profesor Robert Gordon, ekonom dari Universitas Northwestern, AS, berpendapat bahwa inovasi dan penemuan yang terjadi pada tahun 2000-an secara mendasar tidak mengubah produktivitas tenaga kerja, seperti yang pernah terjadi pada revolusi industri pertama dan kedua, hingga revolusi komputer dan internet pada 1960-1990. Menurutnya, stagnasi yang terjadi di AS disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan output potensial yang berasal dari sisi penawaran, yaitu perlambatan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dan jumlah jam kerja.

Perlambatan ditunjukkan oleh pertumbuhan *Total Factor Productivity* (TFP) yang mencerminkan ukuran kecepatan perubahan inovasi dan teknologi yang semakin turun, dari 2,17 persen pada 1920-1950 menjadi hanya 0,54 persen pada 2004-2014. Seperti TFP, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja (output per jam) juga mengalami penurunan dari 2,97 persen pada 1920-1950 menjadi 1,22 persen pada 2004-2014. Hal ini menunjukkan revolusi informasi komunikasi dan teknologi pada era dot.com bukan meningkatkan produktivitas, melainkan menurunkannya (*diminishing returns*). Untuk itu, Prof. Gordon berpendapat perlu adanya inovasi dan penemuan yang memiliki daya dorong besar terhadap pertumbuhan. Jika tidak, akan terjadi kondisi "*the death of innovation, the end of growth*".

Salah satu hambatan dalam inovasi dan penemuan yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi di masa depan adalah *aging population* atau penduduk yang semakin tua. Mereka tidak hanya membutuhkan biaya pensiun tinggi, tetapi juga jaminan sosial seperti kesehatan. Selain itu, populasi usia kerja (umur 15-64) akan semakin kecil, sehingga mengganggu produktivitas. Penurunan populasi usia kerja telah terjadi di Perancis, Italia, Jerman, Inggris, dan Jepang. Populasi usia kerja di sana bisa turun hingga di bawah 60 persen dari jumlah populasi yang ada.

Penutup

Momentum perbaikan ekonomi global akan semakin memperkuat sisi eksternal ekonomi Indonesia, sehingga perlu disikapi dengan kerja cerdas dan tidak berpuas diri. Menurut studi yang dilakukan IMF, reformasi akan lebih manjur dan mudah diterapkan saat kondisi ekonomi sedang sehat. Ini saatnya membiasakan untuk membuat kebijakan bagus di saat yang baik dan menghindari

kebiasaan membuat kebijakan yang bagus pada kondisi buruk.

Kebijakan yang sebaiknya dipertahankan dan dipertajam adalah diversifikasi pada struktur maupun tujuan ekspor, serta peningkatan nilai tambah pada produk-produk ekspor (kebijakan hilirisasi). Kebijakan ini sebaiknya ditinjau secara terintegrasi dengan konsep pendekatan industri dari hulu sampai hilir, serta harus menghilangkan ego sektoral, sehingga kasus kegagalan hilirisasi karena kelangkaan bahan baku dapat dihindari.

Peningkatan inovasi dan penemuan di Indonesia dapat didorong dengan mendirikan taman sains dan teknologi (*science techno park*), semacam *silicon valley*, yang memadukan dunia industri, perguruan tinggi, pusat riset dan pelatihan, kewirausahaan, perbankan, serta pemerintah pusat dan daerah dalam satu lokasi agar dapat menghasilkan produk-produk kombinasi SDA, teknologi, dan ekonomi kreatif.

Selanjutnya guna menarik dana investor asing, perlu dilakukan reformasi struktural, berfokus pada sektor yang berorientasi ekspor, serta dibuat kebijakan agar investor asing yang masuk lebih berorientasi jangka panjang (PMA/FDI). Hal penting lain adalah upaya pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*) dan memperkuat basis pasar investor domestik guna melindungi sektor keuangan saat terjadi gejala *sudden reversal*. Termasuk juga memperkuat sisi fiskal, dengan menyusun anggaran negara yang kredibel dan tahan terhadap gejala eksternal, serta menjaga stabilitas ekonomi makro.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja

OBJEK Revaluasi BMN

Revaluasi penting untuk meningkatkan validitas dan keakuratan nilai BMN yang disajikan dalam laporan keuangan.



TANAH



BANGUNAN



J.I.J.

nilai untuk negeri

www.djkn.kemenkeu.go.id

[ditjenkn](https://www.instagram.com/ditjenkn)

[/DitjenKekayaanNegara](https://www.facebook.com/DitjenKekayaanNegara)

[@DitjenKN](https://twitter.com/DitjenKN)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Call Center
1500 991

Kiat Agus Raih Gelar Doktor Singkat



Agus Darmawan hanya membutuhkan waktu dua tahun tiga bulan untuk menyelesaikan program doktoral di Universitas Padjajaran, Bandung. Dengan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Agus—biasa dia disapa—berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,96. Agus saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Layanan Hukum 1A, Keasdepan Layanan Hukum, Kedeputusan Infrastruktur Bisnis di Kementerian BUMN dengan status sebagai PNS Kemenkeu Dipekerjakan.

Bagi Agus, melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktoral adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. “Manusia sempurna menurut agama yang saya anut adalah jasmani yang sehat serta kuat dan berketerampilan, cerdas serta pandai,” ujarnya. Pendidikan merupakan suatu proses pembaharuan makna pengalaman, sehingga pada hakekatnya proses belajar tidak pernah mengenal batas. “Yang terpenting adalah bahwa ilmu yang saya peroleh nantinya memberi manfaat bagi organisasi tempat saya bekerja

dan masyarakat,” kata pria kelahiran Sumenep, 1 Agustus 1976 itu.

Agus tertarik untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP karena integritas dan nilai dari lembaga ini tidak diragukan lagi. “Setiap anak negeri mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan beasiswa LPDP dan lulus seleksi tanpa intervensi dari golongan manapun,” ujarnya. Menurut Agus, filosofi logo LPDP menambah ketertarikannya untuk mendaftar seleksi.

Ketika niat baik sudah ada, jalan pun terbuka. Agus merasa mendapatkan banyak kemudahan saat mempersiapkan aplikasi pendaftaran LPDP, mulai dari belajar bahasa untuk mendapatkan nilai TOEFL/IELTS yang memenuhi persyaratan, menyusun proposal disertasi penelitian, menulis esai, serta melengkapi syarat-syarat lainnya. Agus dinyatakan lulus seleksi LPDP pada 2014 dan mengikuti program Persiapan Keberangkatan Angkatan 10.

Memenuhi kebutuhan organisasi Agus mulai menjalani perkuliahan pada 15 September 2014 dan lulus Sidang Promosi Doktor pada tanggal 23 Desember 2016. “Bidang ilmu hukum yang

saya pelajari memiliki karakter *sui generis* atau memiliki karakter tersendiri sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan, sehingga ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang seyogianya atau apa yang seharusnya,” ujarnya.

Lebih jauh, pria yang memiliki gelar Magister Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia itu menjelaskan perbedaan hukum sebagai ilmu preskriptif dan terapan. “Ilmu preskriptif mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sedangkan sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum,” kata Agus.

Untuk mencapai tujuan hukum dalam menertibkan masyarakat, Agus melanjutkan, hukum harus bisa mengikuti perkembangan dan gejolak masyarakat, sehingga segala kejahatan sosial dapat diatasi dengan hukum yang ada. “Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum,” ujarnya. Dengan kepastian hukum, masyarakat akan



Agus berharap ilmu yang diperoleh bisa memberi manfaat bagi organisasi dan masyarakat.

Foto
Anas Nur Huda

lebih tertib. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.

“Dalam konteks inilah mengapa saya mempelajari ilmu hukum, karena sifatnya yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat,” kata peraih gelar sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan sarjana Hukum dari Universitas Airlangga itu.

Setelah menyelesaikan pendidikan doktoral, Agus berharap dapat berkontribusi dalam menyusun kerangka kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan negara. Disertasi yang ditulis Agus mengambil topik tentang pembentukan Badan Hukum *Sui Generis* dalam pengelolaan investasi pemerintah sebagai upaya pembaharuan hukum di bidang investasi pemerintah. Disertasi itu diharapkan memberikan pemikiran tentang bagaimana mengelola investasi pemerintah yang lebih baik lagi untuk kesejahteraan rakyat.

Agus memiliki alasan personal mengapa tertarik untuk mengambil

jurusan hukum saat menempuh program S-3. Dorongan itu berasal dari sang ayah yang sangat tertarik dengan bidang ini, tapi tidak bisa menekuninya karena kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga akhirnya menekuni bidang pendidikan. “Jadi istilah lainnya, saya melanjutkan cita-cita ayah menjadi ahli hukum dan memberikan kebanggaan kepada kedua orang tua,” kata Agus.

Kiat sukses

Menurut Agus, tantangan terbesar dalam menyelesaikan pendidikan doktoral adalah diri sendiri. Rasa malas, kehabisan ide, hingga menyusun *timeline* penyelesaian disertasi menjadi penyakit terbesar mahasiswa doktoral. Ada kiat sukses yang dibagikan Agus untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu menulis setiap hari. Agus menjelaskan bahwa otak manusia selalu memerlukan stimulus dan salah satu caranya adalah dengan menulis untuk terus menggali ide. “Lebih baik menulis tapi salah dan akhirnya dihapus sama sekali daripada tidak pernah menulis karena takut salah,” kata Agus. Hal penting lainnya adalah mempersiapkan bahan materi (jurnal,

literatur, data awal) dengan baik sebelum memutuskan untuk menempuh program doktoral.

Selain belajar, Agus juga memiliki aktivitas lain selama menempuh pendidikan. Dia bergabung dalam forum diskusi dengan latar belakang keilmuan hukum yang berbeda (hukum internasional, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum lingkungan) untuk membahas permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. “Sebagai *awardee* LPDP, saya juga tergabung dalam Keluarga Besar LPDP Unpad dan LPDP Bandung Raya (Baraya) untuk menjalin silaturahmi dan *sharing* pemikiran,” ujar suami dari Dian Kuswarjanti tersebut.

Bagi generasi muda yang tertarik mengikuti seleksi beasiswa LPDP, Agus berharap mereka tidak mudah menyerah, terus semangat dan mempersiapkan diri dengan baik dalam menjalani seleksi. “Dan yang terpenting juga adalah luruskan niat, *Inshaallah* Allah akan slalu memberikan kemudahan,” katanya.

Teks Dwinanda Ardhi



Ilustrasi
Muhammad
Fithrah

Pajak dan Dukungan Publik

Teks Ryan Agatha, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Dewasa ini masyarakat sangat sensitif dan responsif terhadap pemberitaan. Salah satu contoh menarik adalah seringnya generasi muda memberikan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di media sosial. Secara tidak langsung hal ini memberi pesan bahwa “kami anak muda Indonesia berdiri di garda paling depan mendukung memberantasan korupsi”.

Fenomena ini mempunyai efek berganda terhadap pembentukan opini publik. Apalagi para intelektual, LSM, serta politisi turut memberi komentar. Dukungan Publik ini menjadi sebuah kekuatan bagi KPK dalam menjalankan tugasnya sejak didirikan pada tahun 2002. Emory S. Bogardus pada buku

Measuring Publik Opinion menyampaikan bahwa dukungan publik dapat menjadi kekuatan bagi suatu kebijakan untuk dapat berjalan di masyarakat.

Dukungan publik tersebut didasari oleh kepercayaan bahwa KPK dapat menekan angka korupsi yang berdampak pada terhambatnya laju perekonomian. Tentu hal ini tidak terlepas dari gambaran seorang koruptor yang mencuri uang negara. Namun, perlu kita sadari bahwa dampak yang sama juga terjadi ketika terdapat badan usaha atau orang pribadi yang melakukan penghindaran pajak, sebab mengurangi sumber daya negara dalam melakukan ekspansi di bidang kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur.

Alison Holder, *Oxfam Tax and Inequality Policy Manager* pada artikel “*The True Costs of Tax Avoidance*” pada website *World Finance* mengatakan, penghindaran pajak berdampak sangat besar pada negara berkembang. Ketidakpastian dalam memprediksi pendapatan pajak untuk ekspansi kesejahteraan dapat mengakibatkan kematian. Christian Aid pada jurnal “*Death and Taxes: The True Toll of Tax Dodging*” (2008) menyampaikan, penghindaran pajak mengakibatkan kematian pada setidaknya 5,6 juta anak di dunia sejak 2000 hingga 2015.

Selain itu seperti yang telah dijabarkan oleh Harold Crooks pada film dokumentasinya yang berjudul “*The Price We Pay*”, dunia sedang menghadapi revolusi industri yang besar. Secara keuangan perusahaan sebesar Kodak yang memiliki 30 ribu pegawai dapat dikalahkan oleh Instagram yang hanya memiliki 30 pegawai. Perkembangan dunia *digital* ini mengisyaratkan bahwa perusahaan *e-commerce* yang sangat mudah melakukan penghindaran pajak akan menguasai perdagangan.

Di sisi lain, dunia juga dihadapkan dengan dokumen Panama Papers yang memuat para tokoh dunia yang menggunakan kedok ‘perusahaan tempurung’ untuk menghindari pajak. Melihat situasi ini, pada November 2014 negara-negara yang terdaftar pada G-20 mendeklarasikan komitmen bersama untuk melawan penghindaran pajak. Seperti yang diutarakan Tony Abbott, Perdana Menteri Australia saat itu, G-20 menentang keras penghindaran pajak dan berharap semua perusahaan membayar pajak secara adil sesuai yurisdiksi.

Indonesia sendiri masih dihadapkan masih rendahnya rasio pajak. Saat ini rasio pajak Indonesia masih berada di kisaran 11 persen yang menempatkan Indonesia pada jajaran negara-negara dengan rasio pajak terendah di dunia. Rasio ini masih jauh tertinggal dari barisan negara menengah yaitu sekitar 15 persen dan negara maju sebesar 24-25 persen. Apabila penghindaran pajak diatasi dan penguatan institusi pajak terlaksana, maka rasio pajak Indonesia tentu akan meningkat.

Selain itu, sejak tahun 2008 penerimaan pajak Indonesia belum pernah mencapai 100 persen. Hal ini tentu menggambarkan basis data perpajakan tergerus akibat digitalisasi industri global yang berujung pada munculnya penghindaran pajak.

Pajak sendiri mengambil peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sekitar 80 persen pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi kita sebagian besar masih bergantung pada belanja pemerintah. Jika penerimaan pajak menurun dan mengurangi besaran belanja pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat.

Melihat hal ini, Presiden Jokowi mengambil langkah serius dengan

menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu ini disahkan sebagai langkah awal era keterbukaan informasi untuk perpajakan serta persiapan keikutsertaan Indonesia dalam Pertukaran Informasi Secara Otomatis yang di prakarsai oleh OECD. Nantinya, seluruh negara anggota OECD dapat mengakses data perbankan antarnegara dan membatasi kerahasiaan data perbankan internasional. Dengan begitu, pajak dapat dikenakan secara adil kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Apabila hal ini dapat tercapai, setiap warga Indonesia akan dapat menikmati infrastruktur, jaminan sosial, serta pendidikan yang sama seperti di ibukota negara. Tetapi segala kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak dapat dijalankan sendirian. Sama halnya dengan KPK, DJP juga membutuhkan dukungan masyarakat. Terlebih lagi peran pajak bagi kelangsungan perekonomian tidak kalah penting dengan pemberantasan korupsi.

Dukungan publik tersebut dapat dimulai dari rasa bangga telah membayar bayar, hingga dukungan politisi terhadap kebijakan perpajakan. Para aktivis pada LSM dan masyarakat dapat secara bebas menyuarakan pendapatnya dalam diskusi-diskusi mengenai penguatan peraturan perpajakan. Masyarakat yang dapat memberikan sanksi sosial terhadap pelaku penghindaran pajak.

Tanpa dukungan publik, mustahil bagi DJP untuk mengantisipasi penghindaran perpajakan. Saya pribadi menantikan kondisi dimana tokoh nasional memposisikan slogan “Bangga bayar pajak” sebagai bentuk nasionalisme, setara dengan slogan anti korupsi. Karena “Saya Indonesia, saya anti korupsi, saya bayar pajak, dan saya Pancasila”.

Dana Jaminan untuk Percepatan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.



Di dalam Rancangan RAPBN 2018, alokasi belanja pembangunan infrastruktur mencapai nilai sebesar Rp409 triliun.

Foto
Tino Adi Prabowo

Pembangunan infrastruktur penting bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan bahwa infrastruktur tidak hanya digunakan untuk memenuhi layanan dasar masyarakat, tetapi juga bermanfaat untuk mendorong perbaikan konektivitas, distribusi logistik, transportasi, dan elektrifikasi. Oleh sebab itu, pemerataan pembangunan

infrastruktur di daerah perlu juga untuk ditingkatkan.

Di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, alokasi belanja pembangunan infrastruktur mencapai nilai sebesar Rp409 triliun. Nilai ini tidak akan mencukupi jika pemerintah hanya mengandalkan APBN untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur. Perhitungan Asian Development Bank (ADB) menyebutkan

bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur Indonesia untuk kurun waktu 2015–2019 adalah sebesar Rp945 triliun (US\$70 miliar) setiap tahunnya. Kondisi ini jelas menyiratkan terjadinya *gap* pembiayaan pembangunan infrastruktur sebesar Rp536 triliun per tahun. Untuk meminimalisir *gap* tersebut, pemerintah akan menggunakan mekanisme kemitraan pemerintah–swasta untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

Infrastruktur Daerah

Salah satu pola kemitraan pemerintah–swasta untuk pembangunan infrastruktur di daerah adalah kerjasama pemerintah pusat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Di dalam kemitraan ini, PT SMI akan melaksanakan fungsi sebagai pemberi pinjaman kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Pinjaman yang diberikan PT SMI akan digunakan untuk membiayai sejumlah pembangunan infrastruktur daerah berdasarkan penugasan yang diberikan Menteri Keuangan kepada PT SMI. Kemudian, agar pinjaman dapat dikembalikan tepat waktu, Menteri Keuangan akan menetapkan sejumlah jaminan di mana jaminan ini menjadi salah satu cara penyelesaian tunggakan Pemda apabila mengalami gagal bayar. Mekanismenya, Pemerintah akan menetapkan penggunaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (DJPPID) kepada PT SMI dan pelaksanaan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) sehubungan pelaksanaan penugasan atas pembiayaan infrastruktur daerah. Ketentuan ini diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 18 September 2017.

DJPPID sendiri digunakan untuk membayar terlebih dahulu tunggakan Pemda yang mengalami gagal bayar kepada PT SMI. Kemudian, DJPPID dikelola di dalam satu rekening. Sementara itu, tunggakan Pemda sendiri merupakan kewajiban daerah yang telah jatuh tempo, tetapi belum dibayar sebagian atau seluruhnya berdasarkan Perjanjian Infrastruktur Daerah. Dengan aturan ini, terdapat kepastian bagi PT SMI dalam menyelesaikan tunggakan Pemda sehubungan pelaksanaan penugasan atas pembiayaan infrastruktur daerah. Kewajiban daerah tersebut mencakup pinjaman daerah sesuai perjanjian

pinjaman pembiayaan infrastruktur daerah. Total kewajiban dapat berupa utang pokok dan/atau bunga yang telah jatuh tempo beserta denda dan atau biaya lain yang timbul dari perjanjian tersebut.

Penetapan KPA

PMK Nomor 125/PMK.08/2017 meliputi aturan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) DJPPID, penganggaran dan penyediaan anggaran kewajiban penjaminan penugasan PT SMI, pembukaan rekening DJPPID, pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan penugasan PT SMI ke rekening DJPPID, mekanisme pembayaran tunggakan, penggantian DJPPID melalui pemotongan DAU dan atau DBH, penutupan rekening DJPPID serta sistem akuntansi dan pelaporan DJPPID.

Untuk menangani pengelolaan DJPPID, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN menetapkan Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai KPA BUN. Selain melakukan tugas sebagai KPA pada umumnya, KPA BUN dalam pengelolaan DJPPID juga memiliki tugas dan fungsi menetapkan pejabat di bawahnya dan tata laksana DJPPID, yaitu mengajukan usulan pembukaan rekening, memindahbukukan anggaran kewajiban penjaminan penugasan PT SMI ke rekening DJPPID, melakukan pembayaran tunggakan kepada PT SMI, memindahbukukan dana hasil pemotongan DAU dan atau DBH ke rekening DJPPID, mengajukan usulan penutupan rekening dan menyampaikan laporan keuangan pengelolaannya.

Sistem Akuntansi

Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, disusun sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan DJPPID. Penyajian DJPPID sendiri dilakukan secara *cash basis* dan penggunaannya juga dibatasi pada kelompok dana cadangan di dalam neraca pemerintah. Unit akuntansi KPA

BUN DJPPID memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi terkait realisasi pembiayaan dan pengeluaran penjaminan, penerimaan non anggaran dan kewajiban penjaminan ke PT SMI. *Output* dari sistem akuntansi tersebut adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penutup

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di daerah sangat diperlukan. Agar pembangunan infrastruktur di daerah tersebut dapat dipercepat, pemerintah pusat memberikan beberapa kewenangan kepada Pemda. Pemerintah pusat pun menyediakan mekanisme jaminan terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan dana yang berasal dari pinjaman PT SMI. Pinjaman ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah pula. Pinjaman ini pada dasarnya juga dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur lainnya, sehingga daerah dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari APBD atau pun APBN. Dengan pinjaman ini, Pemda diharapkan berhati-hati dan mengembalikan pinjaman secara tepat waktu. Apabila Pemda tidak dapat mengembalikan secara tepat waktu, maka DAU dan DBH dapat menjadi jaminan pembayaran utang pembiayaan infrastruktur. Oleh sebab itu, perencanaan, pengelolaan risiko, dan sistem pengembalian pinjaman harus benar–benar dilaksanakan secara cermat oleh Pemda setempat.

Teks Budi Sulistyono

Menebarkan Cahaya Quran di Kampus STAN

Adzan isya sudah berlalu. Di rumah kontrakan itu, sayup-sayup terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran. Seluruh penghuni rumah tak hanya sedang membaca kitab suci tersebut, namun juga mendalami maknanya. Mereka semua adalah mahasiswa Politeknik Keuangan Negara (PKN) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang tergabung dalam komunitas Rumah Quran.

Andi Nur Syamsudin, salah satu inisiator Rumah Quran STAN, bersyukur dengan keberadaan Rumah Quran yang menjadi sarana mencintai Al-Quran bagi adik-adik kelasnya di PKN STAN. Rumah Quran STAN mengadopsi Rumah Quran Indonesia di Depok. Rumah Quran sendiri awalnya dibentuk hanya untuk mahasiswa Universitas Indonesia. Pada tahun 2011, Andi menerima ajakan rekan

seangkatannya untuk bersama-sama mendirikan Rumah Quran cabang STAN. Saat itu, lulusan Program D3 STAN jurusan Akuntansi Pemerintahan tahun 2009 ini bertugas mencari rumah sebagai tempat para santri mempelajari Al-Quran. Akhirnya dua buah rumah berhasil disewa sebagai lokasi belajar, yaitu rumah yang berlokasi di Jalan Ceger dan Jalan Jeruk di kawasan Pondok Jurang Mangu Indah (PJMI). Kedua kawasan ini memang

dikenal strategis sebagai tempat tinggal mahasiswa STAN yang merantau. Saat itu Andi masih berkantor di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jalan Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta. Jarak yang cukup jauh antara kantor dan lokasi Rumah Quran di Bintaro membuat gerak Andi terbatas. Bersyukur sejak tahun 2014, kantor Pusdiklat Pengembangan SDM yang berada di

bawah naungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) berpindah ke kompleks PKN STAN.

Kini, kegiatan Andi memang terpusat di Bintaro. Selain berkantor dan berorganisasi di Bintaro, ayah seorang putri ini juga memilih tempat tinggal tak jauh dari kampus PKN STAN, tepatnya di Griya Ilhami 2 Kompleks Pajak. Rumah tersebut menjadi tempat berkumpul Andi bersama rekan-rekannya untuk merencanakan program Rumah Quran ke depan.

Kini, Rumah Quran STAN telah memiliki tiga rumah yang disewa dan dua rumah gratis (milik donatur) yang digunakan sebagai lokasi tinggal sekaligus belajar Al-Quran. "Saya berharap para alumni Rumah Quran bisa berbagi semangat dengan mengajarkan Al-Quran di manapun ia berada," ujarnya.

Keseharian bersama Quran

Pria kelahiran tahun 1988 ini menghabiskan masa kecilnya hingga sekolah menengah atas di kota Semarang. Saat baru lulus SMA, Andi pernah mengikuti sebuah lomba membaca Al-Quran yang diselenggarakan di lingkungan internal PT TELKOM se-Indonesia. Dalam masa persiapan lomba, Andi digembleng oleh beberapa ustadz di Masjid Agung Jawa Tengah, Kota Semarang.

"Tidak ada yang istimewa dari saya. Bacaan (Al-Quran) saya biasa saja, hafalan saya pun masih belum banyak saat itu," ujar Andi mengenai terpilihnya ia sebagai perwakilan provinsi Jawa Tengah dalam lomba tersebut. Salah satu guru yang mengajari Andi mengaji saat itu adalah muadzin (orang yang mengumandangkan adzan) di Masjid Agung Jawa Tengah.

Bagi Andi, pengalaman belajar bersama para gurunya di masjid terbesar di Jawa Tengah menjadi cerita yang tak pernah terlupakan. Salah satu hal yang paling membekas yaitu berkali-kali Andi diingatkan oleh sang guru bahwa keikutsertaan lomba ini harus diniatkan sebagai ibadah, bukan karena mengejar hadiah.

Tahun 2006, Andi menerima pengumuman dirinya diterima sebagai calon mahasiswa STAN. Layaknya mahasiswa lain yang mengikuti beragam organisasi kemahasiswaan, Andi pun tergabung ke dalam beberapa komunitas. Di awal masa perkuliahan, Andi bersama sejumlah rekan kampus membentuk tim Nasyid bernama FAITH. Nasyid adalah seni suara berisikan dakwah Islam yang biasanya dinyanyikan secara akapela.

Andi memang tidak ingin waktunya terbuang begitu saja untuk kegiatan yang kurang bermanfaat. Untuk kegiatan di luar kampus pun, ia memilih aktif dalam aktivitas dakwah. Keterlibatan Andi sebagai sukarelawan pengajar Al-Quran sebenarnya bermula dari tahun 2008. Kala itu, ia terlibat aktif dalam pengelolaan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Annur di kawasan PJMI Bintaro.

Sejak moratorium penerimaan mahasiswa baru STAN, tidak ada lagi kader mahasiswa yang meneruskan pengelolaan TPA Annur. Kegiatan TPA Annur oleh mahasiswa STAN pun terhenti pada tahun 2012. Hingga kini kegiatan TPA Annur dikelola oleh warga setempat.

"TPA Annur itu pengikat mahasiswa dengan warga," tutur suami dari Windy Anita Sari ini. Sekecil apapun bentuknya, seorang mahasiswa memang selayaknya memberikan kontribusi berarti kepada masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut, terjalin komunikasi dan hubungan kekeluargaan yang erat antara mahasiswa dengan warga.

Senang menulis

Di bangku kuliah pula, Andi mulai menikmati dunia menulis. Berawal dari persiapan membuat Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA), Andi mulai membiasakan menulis melalui blog. Hampir sebagian besar tulisannya bergenre fiksi. Hal ini sesuai dengan kegemarannya membaca novel fiksi. Kegemarannya menulis ia buktikan dengan menelurkan dua buah karya. Tahun 2012, Andi menerbitkan buku kumpulan cerpen "Cermin Cahaya" dan menjadi salah satu penulis dalam antologi cerpen "Pesona Odopus."

Selain itu, tulisan Andi mengenai Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset (RPTA) Online juga dibukukan dalam buku CITRA (Catatan Inspirasi Transformasi). Buku CITRA ini merupakan kumpulan kisah inspiratif dari para pegawai Kementerian Keuangan dalam melaksanakan Transformasi Kelembagaan. "Draft tulisan saya masih banyak yang teronggok di komputer. Semoga nanti ada waktu untuk kembali menulis," ujar Andi saat ditanya keinginannya untuk menulis buku kembali dalam waktu dekat.

Teks Pradany Hayyu

Andi pernah menerbitkan buku Cermin Cahaya pada tahun 2012.

Foto
Anas Nur Huda



Tentang Roti Gosong Sebelah

Bayangkan di suatu pagi, Anda terbangun dengan perut lapar. Kemudian, Anda terbayang untuk membuat setangkup roti bakar dengan isian pisang, ditemani secangkir kopi. Andapun bersegera menuju dapur untuk mengambil dua lembar roti yang tersisa. Sembari memanaskan wajan, Anda mengoleskan mentega pada roti dan mempersiapkan bahan tambahan, seperti pisang, gula halus, dan madu.

Saat wajan telah siap, Anda meletakkan roti ke atasnya. Kesibukan di pagi hari kadang membuat kita melakukan banyak hal dalam satu waktu. Hal itu juga yang terjadi, sehingga Anda tidak menyadari bahwa roti yang sedang Anda persiapkan telah gosong pada salah satu sisinya. Setelah bau terbakar menguar memenuhi ruangan, Anda tersadar: roti Anda gosong sebagian.

Bagaimana kira-kira perasaan Anda saat itu? Anda lapar, tetapi roti yang diidamkan telah gosong sebelah. Anda mungkin bersegera mematikan kompor, lalu berlari mengambil kunci mobil, dan memilih makan di cafe terdekat. Bahkan, setelah makan dan menyedap kopi disana, rasa kesal Anda boleh jadi masih tersisa.

Sebaliknya, Anda bisa saja merelakan sisi sebelah gosong dan mempertahankan sisi satunya yang terbakar sempurna. Tentu saja dengan menambahkan sesendok kesabaran di atas roti bakar, disertai senyuman pada tiap gigitannya. Terkadang, kita perlu menertawakan diri sendiri bukan?

Mampu menerima kegagalan disepakati para ilmuwan sebagai bagian dari komponen penentu kesuksesan seseorang. Hal ini disebut dengan *adversity quotient* (AQ). Level AQ yang tinggi menentukan level kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, produktivitas, dan kreativitas. Bahkan, AQ dipercaya mampu menjaga level kebahagiaan, vitalitas, dan kesehatan. Riset menemukan, mereka yang memiliki level AQ tinggi, lebih dulu dipromosikan dalam pekerjaannya dibanding dengan rekan kerja lain yang memiliki level AQ rendah.

Kabar baiknya, berbeda dengan IQ yang angkanya cenderung tetap, AQ dapat dipelajari dari usia muda sehingga kelak bisa menjadi habit. AQ terdiri atas 4 area, yaitu *control*, *ownership*, *reach*, dan *endurance* (CORE). *Control* diartikan sebagai kemampuan seseorang

mengendalikan *adversity* (masalah). *Ownership* menggambarkan kemampuan seseorang memahami sebab akibat dari sebuah masalah dan keinginan seseorang untuk menerima tanggung jawab penuh. *Reach* menggambarkan kemampuan seseorang untuk mengukur dampak dari sebuah masalah terhadap kehidupannya, seperti pekerjaan. Terakhir, *endurance* mengukur kemampuan memetakan lamanya sebuah masalah akan selesai serta dampak akhirnya.

Kembali pada roti gosong sebelah, kita bisa menilai bahwa level untuk mengontrol masalah kegosongan ini seharusnya sangat rendah. Penyebabnya jelas karena kelalaian sendiri, sedangkan akibatnya pun tidak besar bagi kehidupan. Setelah sisi sebelah roti matang sempurna, permasalahan perut lapar selesai. Bahagia? Jelas. Sebab tingkat kekesalan akibat roti gosong sebelah, nilainya menjadi nol.

Dari roti gosong sebelah, kita belajar, bahwa berada di tengah dunia yang penuh kesulitan sekarang ini, perlu rasanya untuk melatih AQ kita agar naik ke level berikutnya.

Teks Athiah Listyowati



Judul: Keluarga Kita : Mencintai Dengan Lebih Baik
Pengarang: Najeela Shihab
Penerbit: Buah Hati
Kota Terbit: Tangerang Selatan
Tahun Terbit: 2017
Deskripsi Fisik: 196 halaman
ISBN: 9786027652941



Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat

Perpustakaan Kemenkeu
 Perpustakaan Kementerian Keuangan
 @kemenkeulib

www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

5 Buku Fiksi Terpopuler

- 1 **Hujan** Tere Liye
- 2 **O** Eka Kurniawan
- 3 **Milea** Pidi Baiq
- 4 **Si Juki : Seri Keroyokan Semangat Baru #2** Faza Meonk
- 5 **Ibuk** Iwan Setyawan

5 Buku Non-Fiksi Terpopuler

- 1 **Akuntansi Asuransi Syariah** Nur Ai Bayinah
- 2 **Akuntansi Forensik & Audit Investigatif** Theodorus M Tuanakotta
- 3 **Menuju Ketangguhan Ekonomi Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia** Tim Indef
- 4 **Parentthink** Mona Ratuliu
- 5 **5 Guru Kecilku** Kiki Barkiah

Keluarga Kita: Mencintai Dengan Lebih Baik

Pembahasan buku ini sebetulnya cukup serius, namun dengan balutan desain grafis yang menarik, pembaca dapat dengan mudah memahami maksud dari penulis. Penulis ingin mengenalkan bahwa pendidikan bukan hanya berkaitan dengan anak, apalagi terkait sekolah, tapi berhubungan erat dengan apa yang terjadi di dalam keluarga. Keluarga adalah pendidik pertama dan utama. Hambatan yang biasa ditemui para keluarga di Indonesia yaitu sedikitnya dukungan dan dorongan lingkungan untuk menjalankan peran keluarga dengan optimal agar kelak dapat mencintai keluarga dengan lebih baik.

Pengasuhan anak (*parenting*) tentu tak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan yaitu adanya perbedaan paradigma saat melihat tujuan pendidikan, fitrah bawaan anak, serta peran orang tua di sekitar keluarga. Untuk itu, penulis menghadirkan konsep Keluarga Kita untuk mendidik para keluarga di seluruh Indonesia mengenai pengasuhan anak yang baik dan penuh cinta.

Penulis yang merupakan kakak kandung Najwa Shihab ini sangat apik dalam meramu konsep pengasuhan Keluarga Kita dengan tema Hubungan Reflektif, Disiplin Positif, dan Belajar Efektif. Buku ini tidak hanya dipenuhi dengan berbagai teori, namun juga dilengkapi studi kasus berupa tanya jawab orang tua dengan penulis mengenai permasalahan pengasuhan anak.

Salah satu bagian yang paling menarik dari isi buku ini yaitu bab tahap perkembangan anak. Penyampaian bab ini menggunakan infografis yang detail dan mudah dicerna oleh siapa saja yang membacanya. Perpaduan warna-warna desain yang indah membuat halaman infografis ini mudah ditemui di antara ratusan halaman lainnya. Tahap perkembangan anak ini berisi perkembangan anak mulai usia 1 hingga 12 tahun yang meliputi perkembangan fisik, bahasa, serta sosial emosional.

Sampul buku menceritakan gambaran seorang anak yang dikelilingi oleh keluarga besar, bukan hanya keluarga inti. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, penulis selalu menekankan bahwa lingkungan yang membentuk karakter anak bukan hanya keluarga inti saja, namun juga semua orang yang mewarnai keseharian si anak.

Pada bagian akhir buku disampaikan juga tentang komunitas Keluarga Kita dan Rangkul (relawan keluarga) untuk melibatkan semua orang sebagai pendidik dan bagian dari peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui keluarga. Keluarga Kita juga mendorong orang tua untuk berdaya dengan menjadi pembelajar yang efektif dan berbagi praktik pengasuhan untuk mendukung tumbuh kembang anak.

Peresensi Krishna Pandu

Pacu Jalur Tak Lekang Dimakan Zaman

Ini kali pertama saya menginjakkan kaki di Riau. Kunjungan saya ke bumi lancang kuning ini adalah untuk mengunjungi festival Pacu Jalur 2017.

Untuk mencapai Kabupaten Kuansing dari Pekanbaru memakan waktu tiga hingga empat jam. Harus saya akui, perjalanan terasa membosankan. Sepanjang jalan saya hanya menemui pemandangan kebun sawit atau semak belukar. Hanya sesekali saya melewati pemukiman atau pasar tempat warga beraktivitas.

Saat tiba di Kuansing pukul 12 siang cuaca cukup membara. Festival yang diselenggarakan setiap tanggal 23-26 Agustus ini telah menginjak hari kedua. Pandangan saya langsung tertuju pada satu titik keramaian. Benar saja, tak jauh dari tempat saya berhenti, terdapat sungai besar tempat di mana festival Pacu Jalur berlangsung.

Di sekeliling saya anak-anak berteriak “undian jalur.. undian jalur” dengan aksen melayu Riau. Lama kelamaan saya paham mereka membawa daftar peserta Pacu Jalur. Saya tanya kepada salah seorang anak kapan acara dimulai. “Biasanya jam satu siang sampai sore, bang,” jawab anak tersebut. Artinya saya belum kelewatan.

Saat melihat jembatan besar yang menghubungkan ke dua sisi sungai Indragiri tempat berlangsungnya acara. Sungai ini lebar, mencapai dua kali lapangan sepak bola. Banyak sekali warga berkerumun di sana. Namun kami harus beradu kemacetan karena banyak kendaraan yang berlalu lalang.

Beranjak ke tepi sungai, ribuan orang tumpah ruah di tribun-tribun darurat yang dibangun warga setempat. Untuk memasuki tribun cukup membayar Rp30 ribu. Dari tribun yang terletak tepat di tengah garis *start* dan *finish* saya bisa melihat jalannya lomba dengan jelas. Beberapa orang penuh antusias naik ke tiang-tiang dan pohon-pohon untuk menonton dari atas.

Salah satu warga bercerita, tahun 1966 saat berusia lima, dia sudah menyaksikan Pacu Jalur. Artinya, festival ini memang sudah menjadi bagian dari masyarakat Kuansing sejak dulu. Dari daftar nama saya melihat ada 49 kali pertandingan yang berarti ada 98 peserta di hari itu. Pesertanya tidak hanya datang dari Kuansing, tetapi juga dari kabupaten lain di Provinsi Riau.

Perahu yang digunakan dalam lomba terbuat dari kayu utuh yang dapat diisi oleh 45-50 orang. Setiap tim wajib

mengikutsertakan satu penari, satu pemandu sorak, serta seorang pengarah di belakang perahu. Tiap perahu diberi warna khas dengan nama unik. Penonton di samping saya mengungkapkan hanya masyarakat desa asal tim tersebut yang tahu arti nama-nama tim mereka.

Suara riuh penonton tak henti terdengar. Orang dewasa dan anak-anak semua bersorak-sorai. Seorang ibu rela menempuh 40 km setiap hari untuk menyaksikan keseruan Pacu Jalur. Saya takjub melihat bagaimana tradisi ini mampu menjadi pemersatu masyarakat Riau.

Peraturan Pacu Jalur cukup mudah. Setiap tim hanya perlu berada cepat dalam mendayung sejauh 900 meter. Namun tidak sesederhana kelihatannya. Ada beberapa peserta yang harus mengulang perlombaan karena gagal *start*. Biasanya karena arus sungai terlalu kencang, atau karena saat aba-aba meriam bambu ditembakkan, kedua tim tidak memulainya bersamaan.

Hadiah yang diperebutkan cukup besar. Bayangkan saja, juara satu dapat memboyong uang Rp65 juta. Ada juga hadiah lain yang cukup unik berupa hewan ternak seperti sapi atau kerbau. Setiap tahun terdapat sepuluh piala yang diperebutkan.

Teks dan foto M. Ardani,
Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai



Pertunjukan
Pacu Jalur



Memang tak sia-sia Sri Mulyani pulang. Ekonomi tak bisa ditangani sembarang orang. Keras menjaga uang negara agar setiap rupiah yang keluar tidak sia-sia. Integritas menjadi panglima, profesionalisme sebagai bendera. Berbanggalah kalian teman-teman, sudah menjadi penjaga urat nadi bangsa. Yang penuh dedikasi merawat ekonomi Indonesia.

Sebuah puisi berima lugas untuk Sri Mulyani menjadi penutup acara Bedah Buku Catatan Najwa yang dibawakan langsung oleh sang penulis, Najwa Shihab. Bedah buku kali ini merupakan bagian dari acara Festival Literasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Nana, panggilan Najwa, tampil sebagai sosok magis. Berdiri di depan para audiens, Nana berhasil menghipnotis para audiens melalui gaya jurnalistik investigatifnya. Ia yang seharusnya menjadi narasumber malah lebih banyak mendominasi sebagai pihak penanya. Hal itu menjadi lumrah mengingat ia adalah seorang jurnalis wawancara dalam acara talkshow Mata Najwa yang fenomenal. Ia terbiasa mencecar narasumber dengan pertanyaan investigatif. Hampir semua Presiden RI, kecuali Soekarno dan Soeharto, pernah ia wawancarai.

Sebagai tuan rumah Mata Najwa, Nana memang terkenal dengan ciri khas puisinya yang berima penuh makna. Hal itu tak bisa terlepas dari sosok dirinya yang cinta terhadap puisi. Ia merupakan salah satu penggila Joko Pinurbo, seorang sastrawan puisi terkenal dari Sukabumi. Selain itu, ia juga pernah menjuarai lomba baca puisi tingkat nasional semasa sekolah dasar. "Waktu SD lombanya. Itu malah buat kebanggaan bagi saya. Jadi memang saya suka puisi. Itu mungkin mempengaruhi bagaimana saya menulis

Puisi Untuk Sri Mulyani

dan berusaha untuk mencari bentuk yang akan mudah diingat orang", ungkapnya.

Di sisi lain, kegemarannya membaca dan menulis menjadikannya didapuk oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) sebagai Duta Baca Indonesia. Ia bekerja sama dengan Perpusnas dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan gerakan Literasi Nasional. Ketika diminta menjadi Duta Baca, ia sempat agak stress karena memang kondisi dan data menunjukkan bahwa minat baca di Indonesia masih jauh dari ideal.

Atas dasar itulah, ia bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia mengadakan program kirim buku gratis ke seluruh pelosok Indonesia setiap tanggal tujuh belas. Di samping itu, ia juga mempromosikan untuk pembukaan Pojok Baca di setiap tempat yang dapat diakses publik. Contohnya dengan mendirikan Pojok Baca di beberapa badan publik seperti di Kantor Samsat dan Bandar Udara. Ia juga bekerja sama dengan salah satu brand makanan terkenal, Markobar, yang mau membuka Pojok Baca di setiap gerainya. "Saya merasa ini tugas yang, yang maha besar, yang memerlukan turun tangan semua pihak untuk bergabung", ujar Nana.

Teks Abdul Aziz

Mas Praim

Cerita: @irfandika Gambar: Bimo Adi



Najwa bersama Sri Mulyani pada acara Festival Literasi di Kemenkeu.

Foto dok. KLI



**MEMPERINGATI
HARI GURU NASIONAL
25 NOVEMBER 2017**

Foto
Gathot Subroto

